

# **KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

## **Provinsi Kepulauan Riau**

Triwulan III - 2007

# KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Kajian Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan III 2007 dapat diselesaikan. Selain itu dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain yang terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain perkembangan/pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Kantor Bank Indonesia Batam secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Perkembangan Perekonomian dan Keuangan Daerah (PEKDA) Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan PEKDA dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan stakeholder eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada BPS Batam yang telah bersedia bekerjasama dalam menyusun perhitungan PDRB kota Batam secara triwulan, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kajian ini. Harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, kami menyadari isi dari kajian yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan-kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, November 2007  
BANK INDONESIA BATAM

ttd

**Irwan Lubis**  
Pemimpin

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI</b>	
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Perkembangan Penanaman Modal Asing .....	5
1.3 Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA) .....	6
1.4 Sektor Ekonomi Dominan. ....	7
<b>BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH</b>	
2.1 Kajian Umum .....	15
2.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang .....	16
2.3 Disagregasi Inflasi .....	19
<b>BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH</b>	
3.1 Kondisi Bank Umum .....	23
3.2 Kondisi BPR.....	29
3.3 Perkembangan Kredit UMKM .....	33
<b>BAB IV. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	
4.1 Kondisi Umum. ....	34
4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	34
4.3 APBD Kota Batam.....	35
4.4 APBD Kota Tanjung Pinang .....	36
4.5 APBD Kabupaten Karimun .....	37
4.6 APBD Kabupaten Bintan.....	37
4.7 APBD Kabupaten Lingga .....	38
4.8 APBD Kabupaten Natuna .....	38
<b>BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN</b>	
5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran .....	40
5.2 Lalu Lintas Pembayaran Giral.....	41
5.3 Uang Palsu .....	43

**BAB VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH**

6.1. Ketenagakerjaan Daerah .....	44
6.2. Kesejahteraan Daerah.... ..	46

**BAB VII. PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH**

7.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	48
7.2. Inflasi.....	49

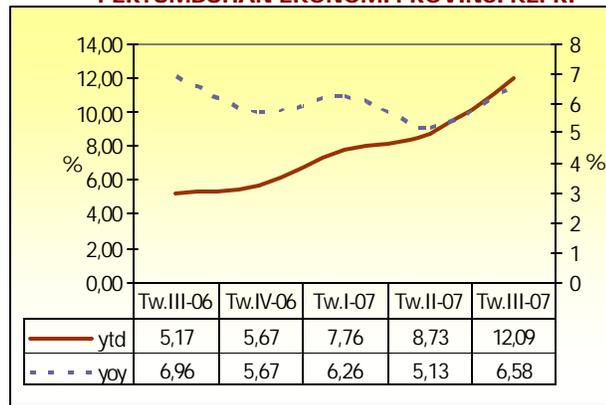
## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi perekonomian Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Tw.III-2007 mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 12,09% (yoy), jauh melebihi pertumbuhannya sebesar 6,58%. PDRB Kepri secara konsisten memperlihatkan peningkatan, meski relatif mengalami perlambatan jika ditinjau secara tahunan.

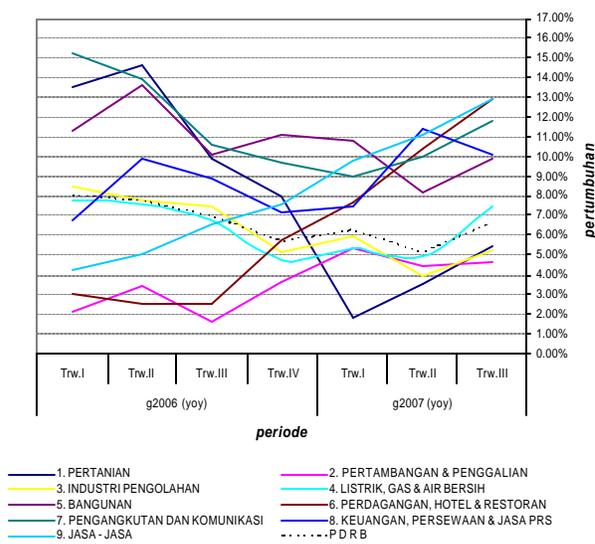
Membaiknya indikator ekonomi regional dihasilkan dari pergerakan IHK yang stabil, terbukanya kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta realisasi investasi domestik dan asing di wilayah prov. Kepri. Sementara itu, stabilitas makro ekonomi terus berlanjut yang ditandai dengan terjaganya volatilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang terkendali

ditengah tekanan krisis *subprime mortgage* di AS dan pelonjakan harga minyak mencapai USD 90/barrel yang diperkirakan akan terus naik terkait kekhawatiran ketegangan Turki di Irak, melemahnya dollar US dan peningkatan permintaan minyak Amerika menyambut musim dingin.

### PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPRI



### PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL

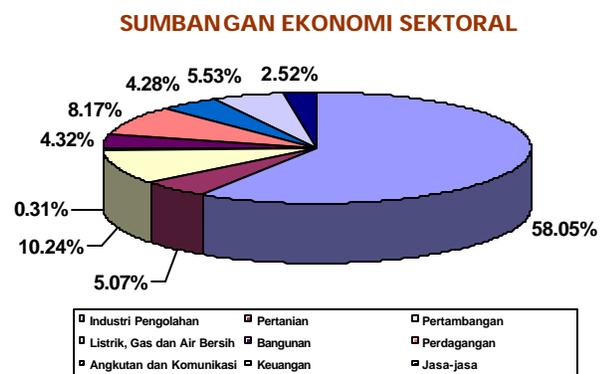


Tren pertumbuhan PDRB sepanjang tahun 2007 memperlihatkan kondisi perekonomian Kepri yang semakin baik. Jika dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, masing-masing sektor secara konsisten mengalami pertumbuhan. Sumbangan pertumbuhan ekonomi sektoral didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, bangunan dan jasa-jasa. Pertumbuhan sektor pertanian dan *property* yang sebelumnya *slow down*, mulai menunjukkan perkembangan yang menggemirakan.

Lokasi strategis Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menjadikan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah Kepri. Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi memasuki Sept-2007 setelah pada bulan-bulan sebelumnya relatif stagnan. Dicabutnya hak khusus Batam sebagai wilayah perdagangan bebas sempat menyebabkan melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi. Sinyal positif mulai terlihat memasuki Agst-2007, saat pemerintah menunjukkan keseriusan terhadap status Bata m, Bintan & Karimun (BBK) sebagai kawasan Free-Trade-Zone (FTZ) melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2007 yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR pada tanggal 9 Oktober 2007.

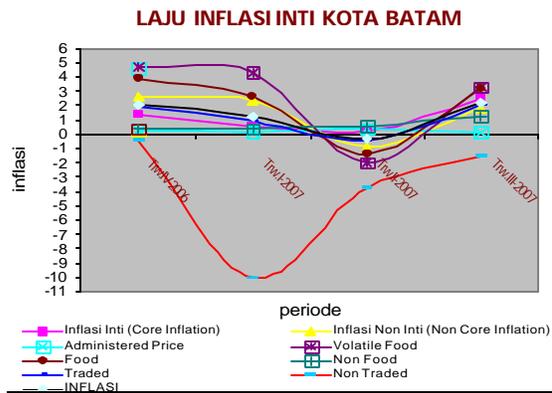
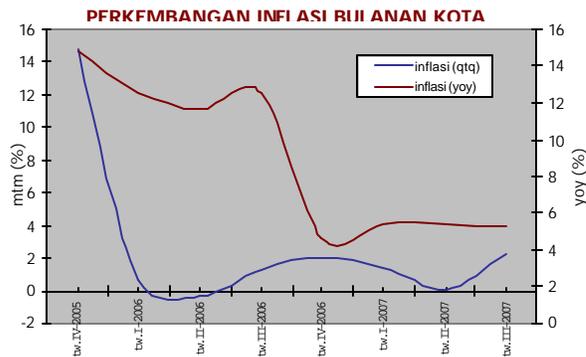
Optimisme investor terhadap kondisi BBK ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) pada awal Agustus 2007 antara 22 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan para kepala daerah BBK. Dari 22 PMA tersebut, total investasi yang akan mengalir ke BBK mencapai 1,9 miliar dolar AS atau lebih dari Rp17,5 triliun, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 50.566 orang. Lebih rinci, investasi tersebut terdiri dari 8 perusahaan di Batam dengan nilai investasi sebesar US\$655,55 juta, 9 perusahaan di Bintan senilai US\$651 juta, 4 perusahaan di Karimun senilai US\$497 juta, dan 1 perusahaan di tiga wilayah BBK dengan investasi sebesar US\$20 juta.

Sumbangan ekonomi sektoral terhadap total pertumbuhan ekonomi tw.III-2007 tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tw.II-2007. Kontribusi sektor industri pengolahan masih mendominasi sumbangan sebesar 58,05%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebesar 59,74%. Namun



demikian, sumbangan ekonomi dari sektor ini diperkirakan meningkat signifikan terkait masuknya investasi baru dimana sebagian besar bergerak di sektor industri pengolahan. Peningkatan kontribusi sektoral terbesar terjadi pada sektor pertanian yang mencatat kenaikan sebesar 0,08% terhadap tw.II-2007, terutama terjadi pada sub-sektor perikanan. Sumbangan sektor pertambangan terhadap total PDRB mengalami penurunan sejak awal tahun 2007, terutama pada sub-sektor penggalian. Hal ini terkait dengan larangan ekspor pasir ke Singapura yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu sektor perdagangan, bangunan, pengangkutan dan jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang meningkat searah dengan pertumbuhan ekonomi regional.

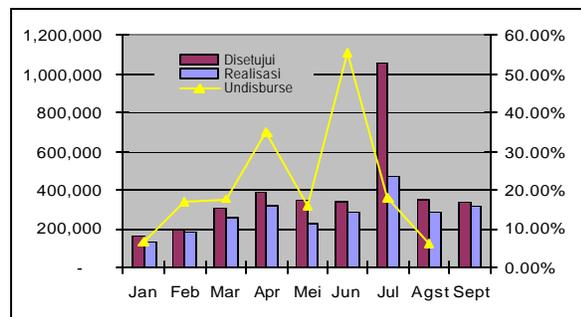
Membbaiknya daya beli masyarakat Batam sebagai sentral perdagangan wilayah Kepri yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan pertumbuhan dari sisi penawaran secara simultan mampu menahan laju inflasi. Inflasi pada *tw.III-2007* tercatat sebesar 2,15%. Meskipun mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, pergerakan inflasi sepanjang tahun 2006-2007 relatif stabil.



Inflasi inti (*core inflation*) mengalami peningkatan menjadi 2,48% dibandingkan *tw.II-2007* sebesar 0,22% atau memberikan sumbangan sebesar 1,28% terhadap total inflasi kota Batam. Penggerak utama *core inflation* berasal dari sub-kelompok jasa pendidikan yang mengalami kenaikan biaya pendidikan memasuki tahun ajaran baru. Gejala kenaikan harga kebutuhan pokok (*volatile food*) saat musim liburan menjadi penyebab utama kenaikan inflasi non inti (*non-core inflation*). Inflasi tertinggi dihasilkan dari sub-kelompok daging, telur, sayuran dan bumbu-bumbuan yang meningkat permintaannya menjelang musim liburan.

Di sektor perbankan, fungsi intermediasi belum sepenuhnya pulih, terlihat dari menurunnya jumlah kredit yang disetujui pada Sept-2007 sebesar Rp 338 milyar dibandingkan Agst-2007 sebesar Rp 352 milyar. Namun demikian, penurunan tingkat *undisburse loan* menunjukkan kondisi usaha yang semakin kondusif yang membuat debitur mulai memakai plafon pinjamannya. Tingkat realisasi kredit diperkirakan akan semakin tinggi menjelang akhir tahun karena bank harus segera mengeksekusi portofolio kredit yang telah disetujui untuk perbaikan kinerja laporan tahunan.

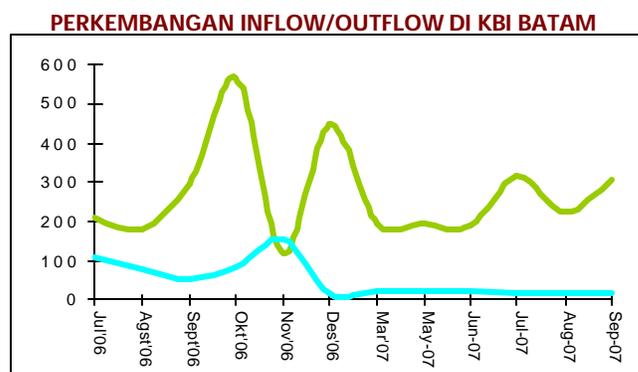
**PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM TAHUN**



Pada bulan Okt-2007, pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepri diperkirakan akan terus mengalami percepatan. Secara sektoral, pertumbuhan yang cukup besar diperkirakan terjadi pada sektor pertanian khususnya sub-sektor perikanan dan perkebunan, sektor industri

pengolahan, bangunan dan jasa-jasa. Sub-sektor komunikasi, hotel dan restoran juga turut meningkat dari pergerakan positif sektor-sektor dominan tersebut. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan diperkirakan masih didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dan belanja pemerintah untuk pembayaran THR pada bulan Okt-2007.

Meski akan mengalami tekanan dari efek kenaikan harga minyak dunia, optimisme momentum penetapan BBK sebagai kawasan FTZ dan perkembangan positif kondisi ekonomi regional diharapkan mampu menahan laju inflasi sehingga laju inflasi pada Okt-2007 diperkirakan relatif stabil.



Sumber : Bank Indonesia Batam

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.III 2007, *outflow* mencapai Rp.308,67 miliar, sementara *inflow* sebesar Rp.14,26 miliar, sehingga terjadi *net outflow*

sebesar Rp.294,41 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.283,51 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.15,89 miliar.

Pada triwulan III 2007 tercatat jumlah uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.308,11 miliar dan uang logam sebanyak Rp.551,9 juta. Sedangkan uang kertas yang masuk ke KBI Batam adalah sebesar Rp.14,26 miliar dan uang logam sebanyak Rp.376 ribu.

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun. Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.III-2007 rata-rata mencapai 3.609 lembar per-hari, meningkat 2500 lembar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1.687 lembar. Sementara untuk nominal transaksi kliring, terdapat kenaikan sebesar Rp.359,46 miliar pada tw.III 2007 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp.2,27 triliun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2007 mencapai Rp.4,58 miliar. Nilai total kliring tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik total warkat kliring maupun secara nominal.

INDIKATOR	Tahun 2006		Tahun 2007		
	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III
MAKRO					
Indeks Harga Konsumen Kota Batam	129.98	132.54	134.41	133.94	136.82
Laju Inflasi Tahunan (yoy %) Kota Batam	12.54%	4.58%	4.68%	4.99%	5.26%
PDRB - harga konstan	8,204,602.30	8,243,348.17	8,407,073.16	8,492,680.27	8,744,419.77
- Pertanian	396,979.93	381,385.23	384,956.85	399,002.69	418,654.47
- Pertambangan & Penggalian	539,292.08	542,617.78	552,920.54	556,105.51	564,250.09
- Industri Pengolahan	5,544,603.95	5,551,424.67	5,661,814.98	5,669,432.17	5,836,216.85
- Listrik, gas dan Air Bersih	18,842.41	19,059.62	19,257.20	19,695.06	20,245.66
- Bangunan	219,971.04	226,754.06	231,735.87	234,523.60	241,640.98
- Perdagangan, Hotel dan Restoran	646,844.24	664,218.49	678,952.27	701,239.26	730,687.87
- Pengangkutan dan Komunikasi	317,240.12	326,883.97	333,534.08	342,939.48	354,665.37
- Keuangan, Persewaan dan Jasa	363,784.40	370,113.28	378,450.50	399,142.50	400,585.96
- Jasa	157,044.13	160,891.07	165,450.87	170,600.00	177,272.52
Pertumbuhan PRDB (yoy %)	6.96%	5.67%	6.26%	5.25%	6.58%
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) *	542.06	542.19	646.90	552.73	582.55
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) *	1,885.49	2,037.58	171.46	1,707.90	1,907.71
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) *	557.12	784.58	834.67	754.56	783.65
Volume Impor Nonmigas (ribu ton) *	200.88	202.23	210.32	195.82	210.24

Ket:

\*) Triwulan III menggunakan data Agustus 2007

INDIKATOR	Tahun 2006		Tahun 2007		
	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III
<b>PERBANKAN</b>					
<b>Bank Umum</b>					
Total Aset (Rp miliar)	13,115	14,593	14,617	15,107	15,852
DPK (Rp miliar)	11,134	12,420	12,462	12,795	13,497
- Tabungan	3,212	3,828	3,844	3,996	4,303
- Giro	4,988	5,086	5,058	5,603	6,062
- Deposito	2,935	3,506	3,560	3,196	3,132
Kredit (Rp miliar) - berdasarkan lokasi proyek	8,289	8,506	8,590	9,277	
- Modal Kerja	3,085	3,068	2,893	3,199	-
- Investasi	2,704	2,820	2,974	3,153	-
- Konsumsi	2,500	2,619	2,723	2,926	-
- LDR	74.44%	68.49%	68.93%	72.51%	-
Kredit (Rp miliar) - berdasarkan lokasi kantor cabang	6,258	6,666	6,713	7,229	7,726
- Modal Kerja	2,299	2,367	2,304	2,494	2,656
- Investasi	1,528	1,758	1,764	1,904	2,073
- Konsumsi	2,431	2,541	2,645	2,831	2,997
- LDR	56.21%	53.67%	53.87%	56.50%	57.24%
Kredit UMKM (Rp miliar)					
Kredit Mikro (< Rp 50 juta) (Rp miliar)					
- Modal Kerja	22.00	23.47	29.22	32.70	37.18
- Investasi	12.97	14.70	17.33	19.52	20.32
- Konsumsi	86.26	89.88	116.53	129.28	162.66
Kredit Kecil (Rp 50 Juta < X = Rp 500 juta ) (Rp miliar)					
- Modal Kerja	409.31	436.19	444.23	481.28	505.91
- Investasi	141.28	161.43	173.29	192.90	215.12
- Konsumsi	563.45	602.74	666.81	741.63	876.27
Kredit Menengah (Rp 500 juta < X = Rp 5 miliar) (Rp miliar)					
- Modal Kerja	1,012.50	1,135.93	1,111.70	1,192.64	1,323.77
- Investasi	398.43	431.38	453.38	464.74	491.21
- Konsumsi	801.72	836.73	811.84	843.84	828.20
Total kredit MKM (Rp miliar)	3,447.91	3,732.44	3,824.33	4,098.53	4,460.65
NPL MKM gross (%)	5.38%	4.83%	5.18%	4.81%	4.51%
NPL MKM nett (%)	-	-	-	-	-
<b>BPR :</b>					
Total Aset (Rp miliar)	371.27	427.64	497.40	498.56	586.75
DPK (Rp miliar)	314.03	356.98	381.65	410.71	459.30
- Tabungan	23.80	28.17	29.25	30.79	35.53
- Deposito	290.23	328.81	352.40	379.92	423.77
Kredit (Rp miliar) - berdasarkan lokasi proyek	196.54	232.00	266.33	306.57	344.92
- Modal Kerja	56.47	62.08	66.14	72.51	81.83
- Investasi	20.54	20.06	20.36	20.32	20.72
- Konsumsi	119.52	149.86	179.84	213.74	242.36
Kredit UMKM (Rp miliar)	196.54	232.00	266.33	306.57	344.92
Rasio NPL gross (%)	1.50%	1.12%	0.75%	0.89%	0.78%
Rasio NPL nett (%)	-	-	-	-	-
LDR	62.59%	64.99%	69.78%	74.64%	75.10%

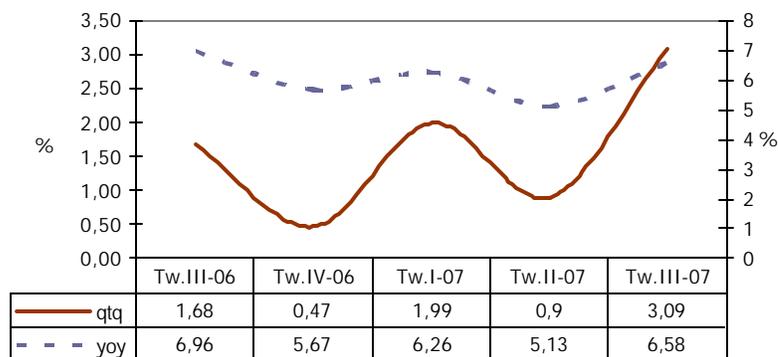
# BAB 1

## PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI

### 1.1 KONDISI UMUM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III-2007 mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tercatat sebesar 6,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2007 sebesar 5,13%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2007 masih relatif mengalami perlambatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 6,96% (yoy).

**GRAFIK 1.1 – PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



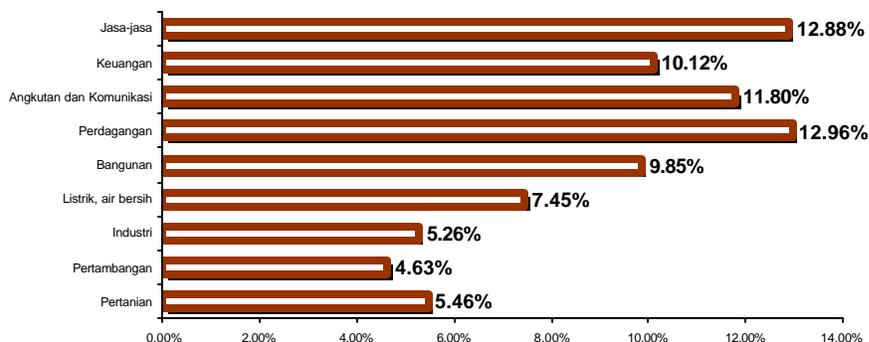
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Tinjauan secara triwulanan menunjukkan bahwa perekonomian Kepri triwulan III-2007 tumbuh signifikan menjadi 3,09%, terhadap triwulan II-2007 sebesar 0,90%. Membaiknya indikator ekonomi regional dihasilkan dari pergerakan inflasi IHK yang relatif stabil, terbukanya kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta realisasi investasi domestik dan asing di wilayah Kepri. Sementara itu, perekonomian nasional terus berlanjut yang ditunjukkan dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro seperti volatilitas nilai tukar rupiah, inflasi IHK, tingkat suku bunga serta situasi keamanan dan politik yang semakin kondusif ditengah tekanan krisis *subprime mortgage* di AS dan pelonjakan harga minyak mencapai US\$90/barrel yang diperkirakan akan terus naik terkait kekhawatiran ketegangan di Turki timur, pelemahan nilai dollar US, dan meningkatnya permintaan minyak AS menyambut musim dingin.

Secara sektoral, tingkat pertumbuhan tertinggi berturut-turut terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,96%), sektor jasa-jasa (12,88%), sektor pengangkutan dan

komunikasi (11,80%) dan sektor keuangan (10,12%). Berdasarkan peranan terhadap perekonomian Kepri, sektor industri masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 58,05% diikuti oleh sektor pertambangan (10,24%), sektor perdagangan (8,17%), sektor keuangan (5,53%) dan pertanian (5,07%).

**GRAFIK 1.2 – LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB TRIWULAN III-2007 (y-o-y)**

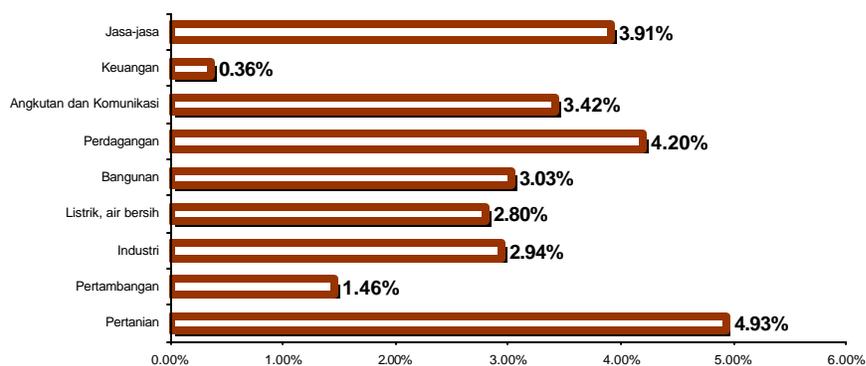


Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, sektor perdagangan memiliki tingkat pertumbuhan terbesar diikuti oleh sektor jasa dan sektor pengangkutan. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan masih mendominasi dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa industri masih menjadi sektor unggulan meskipun porsinya mengalami penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Sektor industri merupakan sektor utama di Provinsi Kepri sebagaimana rencana awal pengembangan pulau Batam di awal tahun 1980-an.

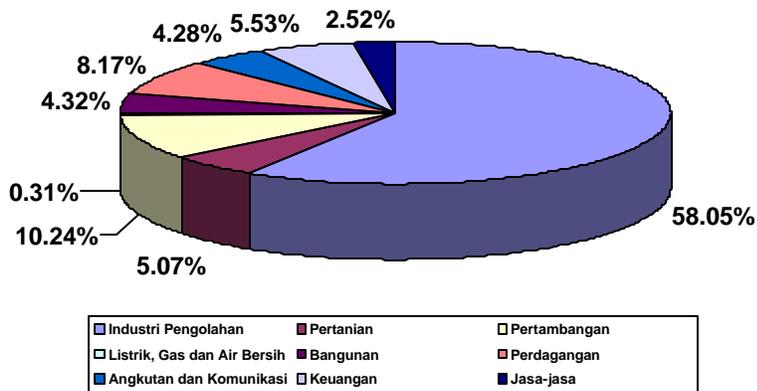
Perekonomian regional pada tw.III-2007 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 3,09% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,90%. Sub-sektor tanaman pangan masih mencatat pertumbuhan negatif sebesar -1,61%, sedangkan sub-sektor perkebunan mengalami *recovery* dengan tumbuh 6,59% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,71%. Namun demikian, pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan sebesar 4,93% masih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan justru terjadi pada sektor keuangan dengan pertumbuhan sebesar 0,36%, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,47%.

**GRAFIK 1.3 – LAJU PERTUMBUHAN TRIWULANAN PDRB TRIWULAN III-2007**



Sumbangan ekonomi sektoral terhadap total pertumbuhan tidak mengalami banyak perubahan. Kontribusi sektor industri pengolahan masih mendominasi sumbangan sebesar 58,05%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebesar 59,74%. Sedangkan peningkatan kontribusi sektoral terbesar terjadi pada sektor pertanian yang mencatat kenaikan sebesar 0,08% terhadap tw.II-2007, terutama terjadi pada sub-sektor perikanan.

**GRAFIK 1.4 – SUMBANGAN EKONOMI SEKTORAL TRIWULAN III-2007**



Sumbangan sektor pertambangan terhadap total PDRB mengalami penurunan sejak awal tahun 2007, terutama pada sub-sektor penggalian. Hal ini terkait dengan larangan ekspor pasir ke Singapura yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu sektor perdagangan, bangunan, pengangkutan dan jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang meningkat searah dengan pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan hasil survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Kota Batam pada tw.III-2007 diketahui bahwa IHPR kota Batam meningkat sebesar 0,69% menjadi 100,69. IHPR untuk tipe kecil, menengah, dan besar mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 0,61%, 0,82%,

dan 0,53%. Peningkatan indeks pada tipe kecil dan menengah berasal dari naiknya permintaan yang sekaligus memberi gambaran semakin besarnya pangsa pasar untuk produk ini. Sedangkan pada tipe besar, kenaikan lebih disebabkan karena pengaruh kurs dollar Singapura.

## Boks. 1

### Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Tw.III – 2007

Survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) merupakan survei rutin triwulanan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial, baik pada triwulan bersangkutan maupun perkiraan triwulan berikutnya. Survei dilakukan terhadap pengembang di wilayah Jabotabek dan 13 Kantor Bank Indonesia, dimana jumlah responden mencakup 40 pengembang utama di Jabotabek dan sekitar 215 pengembang di KBI. Hasil survey ini diolah menjadi Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) gabungan/komposit. Survey Harga Properti Residensial dilakukan sejak triwulan I-1999 untuk Jabotabek dan 12 KBI, dan Pontianak sejak tw.I-2004. Sementara itu, KBI Batam melakukan survei IHPR sejak tw.I-2005.

Ruang lingkup Survey Indeks Harga Properti Residensial (SIHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga aset.

Lokasi responden untuk SHPR berdasarkan pada Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Otorita Batam yang meliputi : Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang dengan jumlah sampel sebanyak 59 proyek dari 23 perusahaan/developer. Sementara itu, harga rata-rata properti residensial pada tw.III-2007 berdasarkan klasifikasi rumah adalah sebagai berikut :

NO	Klasifikasi Rumah	Harga Rata-Rata Rumah	
		Tw.II-2007	Tw.III-2007
1.	Kecil	Rp. 73.022.716,67	Rp. 73.466.779
2.	Sedang	Rp. 185.253.335,51	Rp. 186.770.638
3.	Besar	Rp. 645.435.031,25	Rp. 648.839.504

Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2007

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tipe rumah yang dijual oleh pengembang masih didominasi oleh kelas sedang (46,15%), kelas kecil (35,33%), dan kelas besar (20,51%), Adapun rata-rata harga rumah berdasarkan klasifikasi seluruhnya mengalami kenaikan terhadap tw.II-2007, dimana tipe kecil naik 0,61%, tipe sedang 0,82%, sedangkan tipe besar naik 53%. Hasil survei IHPR Kota Batam tw.III-2007 diketahui bahwa indeks triwulan laporan mengalami peningkatan 0,69%.

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan properti di Batam, antara lain: penyediaan air bersih terkait dengan aturan yang diterapkan ATB bagi developer yang mengajukan sambungan baru, masalah harga bahan bangunan, pembatasan izin kepemilikan rumah bagi WNA di Batam. Sedangkan permasalahan yang paling sedikit mempengaruhi produktivitas adalah keluhan pelanggan tentang kejelasan PPN, spekulasi tanah di Batam dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

## 1.2 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Total nilai investasi Perusahaan Modal Asing (PMA) di Kota Batam periode Jan-Sept 2007 mencapai US\$206 juta atau sekitar Rp1,9 triliun, yang terdiri dari 51 proyek baru dengan nilai investasi US\$195,6 juta dan 4 proyek perluasan usaha senilai US\$10,3 juta. Investasi tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja.

Aplikasi PMA selama periode tersebut berasal dari negara Singapura, Australia, Inggris, Malaysia, Irlandia, Belanda, British Virgin Island, Caymand Island, Swiss, RRC, Korea Selatan, Jerman, Jepang, India dan Amerika Serikat. Lebih rinci, sebaran investasi tersebut terdiri dari 4 proyek industri khusus logam, 6 proyek industri pembuatan kapal, 1 proyek industri pembuatan lensa, 1 proyek industri penyediaan tenaga listrik, industri pipa 2 proyek, perdagangan besar atau distributor utama, baik ekspor atau impor sebanyak 9 proyek, sisanya 28 proyek pada industri jasa lainnya. Menurut keterangan Kepala Biro Pemasaran dan Humas Otorita Batam, khusus bulan September 2007 terdapat 6 aplikasi proyek PMA dengan nilai US\$5,7 juta dan 4 aplikasi Perusahaan Modal Dalam Negeri senilai Rp 1,9 triliun.

**TABEL 1.7 – PERKEMBANGAN RENCANA INVESTASI ASING DI KOTA BATAM**

2006		2007	
Jml Perusahaan	Nilai *) (US\$)	Jml Perusahaan	Nilai *) (US\$)
95	376.796.773	55	205.900.000**

Sumber : Subdit BKPM Otorita Batam

Keterangan : \*) termasuk perluasan usaha

\*\*) periode Jan-Sept 2007

Perkembangan investasi di Batam menunjukkan penurunan, dimana tingkat realisasi investasi periode Jan-Sept.2007 baru mencapai 54,67% dibandingkan pencapaian tahun 2006. Jika mengacu pada optimisme target investasi tahun 2007 yang diperkirakan tumbuh sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2006, maka pencapaian sampai dengan Sept-2007 baru 48,58%.

Penurunan investasi di Batam tidak terlepas dari iklim investasi yang kurang berpihak kepada investor. Belum jelasnya status hukum Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) selama periode tersebut menciptakan kondisi ketidakpastian dan biaya tinggi. Beberapa PMA telah keluar dari Batam dan sebagian besar PMA menunggu kejelasan status hukum tersebut untuk memutuskan melanjutkan atau menghentikan operasional perusahaannya. Namun demikian, seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang FTZ pada awal Oktober 2007, diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut tetap tinggal di Batam dan investasi baru masuk dalam jumlah yang signifikan.

Sinyal positif mulai terlihat dengan ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) 22 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan para kepala daerah BBK. Dari 22 PMA itu, total investasi yang akan mengalir ke BBK mencapai 1,9 miliar dolar AS atau lebih dari Rp17,5 triliun, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 50.566 orang. Lebih rinci, investasi tersebut terdiri dari 8 perusahaan di Batam dengan nilai investasi sebesar US\$655,55 juta, 9 perusahaan di Bintan senilai US\$651 juta, 4 perusahaan di Karimun senilai US\$497 juta, dan 1 perusahaan di tiga wilayah BBK dengan investasi sebesar US\$20 juta. Para investor masih melihat BBK sebagai tempat investasi yang menarik di regional Asia Tenggara. Batam dipandang prospek untuk industri berteknologi tinggi, Bintan untuk industri menengah dan Karimun untuk pengembangan industri galangan kapal. Terbukti di masing-masing kawasan, seperti kawasan industri Lobam, Bintan misalnya, meski ada PMA bidang garmen yang hengkang, namun masih tertutupi dengan masuknya kembali sejumlah investor baru bidang elektronik.

Dengan optimisme terealisasinya investasi baru tersebut maka total investasi asing di Batam sampai akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai US\$861,45 juta, atau meningkat 128,62% dibandingkan tahun 2006.

### **1.3 PERKEMBANGAN PEDAGANG VALUTA ASING (PVA)**

Pedagang Valuta Asing (PVA) atau dikenal dengan *money changer* memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan ini, antara lain dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur keberadaan PVA antara lain : Peraturan Bank Indonesia / PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang PVA, serta Surat Edaran / SE No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi PVA bukan bank.<sup>2</sup>

Pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung peranan PVA di Indonesia, antara lain :

- i. Untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, PVA merupakan lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik.
- ii. Untuk mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan PVA perlu ditingkatkan.

---

<sup>2</sup>Peraturan Bank Indonesia dapat dilihat melalui <http://www.bi.go.id>

Sampai dengan tw.II-2007, jumlah PVA yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 104 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 5 PVA dibandingkan tw.I-2007 yang tercatat sebanyak 99 PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilker KBI Batam. Rincian jumlah PVA pada masing-masing Dati-II di Provinsi Kepulauan Riau adalah: 72 PVA di Kota Batam, 15 PVA di Kota Tanjung Pinang, 10 PVA di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 3 PVA di Tanjung Uban, dan 4 PVA di Bintan.

**TABEL 1.8 – PERKEMBANGAN JUMLAH PVA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Kab/Kota	2006		2007		
		Tw.III	Tw.III	Tw.I	Tw.II	Tw.III
1.	Batam	66	67	69	72	75
2.	Tanjung Pinang	13	13	13	15	15
3.	Tanjung Balai Karimun	9	9	10	10	10
4.	Tanjung Batu	3	3	3	3	3
5.	Bintan	3	4	4	4	4
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>105</b>

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 1.8, diketahui bahwa rata-rata jumlah PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Batam terus meningkat setiap triwulan. Adapun peningkatan yang besar terjadi pada Tw.III-2006 yaitu sebanyak 1 PVA baru yang beroperasi di Batam.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA yang melakukan usaha di wilker KBI Batam menempati urutan ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank tersebut diperkirakan karena tingginya permintaan akan transaksi Uang Kertas Asing (UKA) terkait dengan letak geografis yang berada di pulau terluar Republik Indonesia.

Sementara itu, rekapitulasi volume usaha PVA selama tw.III-2007, secara rata-rata terdapat penurunan transaksi pembelian maupun penjualan mata uang valuta asing.

**TABEL 1.9 – REKAPITULASI VOLUME USAHA PEDAGANG VALUTA ASING  
WILAYAH KERJA KBI BATAM**

Pembelian /Penjualan	Tw.I-07		Tw.II-07		Tw.III-07	
	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan
USD	3.646.472,10	3.571.450,03	2.148.012,70	1.999.776,42	492.226,50	352.168,00
SGD	85.991.644,85	85.624.432,10	50.383.556,13	50.970.046,48	13.287.401,80	14.438.305,35
MYR	29.573.302,09	30.933.173,10	9.854.564,25	12.805.749,09	3.557,992	6.490.704

Sumber: Bank Indonesia

#### 1.4 SEKTOR EKONOMI DOMINAN

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi

Kepulauan Riau, diikuti oleh Tanjung Pinang, Karimun, Bintan, Natuna dan Lingga. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran kontribusi terhadap PDRB, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan, sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun meningkat menjadi lebih besar dari kontribusi Kabupaten Bintan.

#### **1.4.1 PDRB Sisi Penawaran / Produksi**

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode tw.III-2007 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 58,05%, diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 10,24%, sedangkan sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sektor industri berkembang di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan sektor pertambangan & penggalian bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

##### **1.4.1.1 Komponen Industri Pengolahan<sup>3</sup>**

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai terbesar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000<sup>4</sup>, serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan komponen utama pendukung perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sektor industri memberikan kontribusi sebesar 58,05% terhadap PDRB Provinsi Kepri pada tw.III-2007. Keunggulan komparatif Kepri khususnya Batam yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penggerak ekonomi utama daerah ini. Berdasarkan grafik 1.6. terlihat bahwa tingkat kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami tren penurunan meskipun nilainya meningkat pada tw.III-2007. Dicabutnya hak khusus Batam sebagai wilayah perdagangan bebas menjadi penyebab

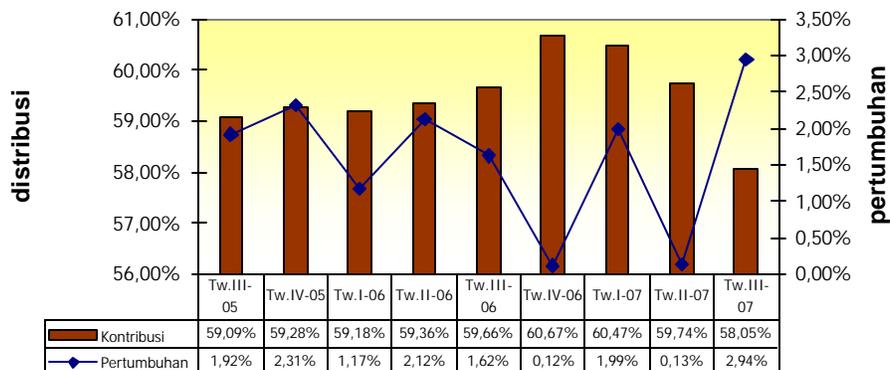
---

<sup>3</sup> Berdasarkan klasifikasi dari BPS, kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 sektor, yaitu: industri pengilangan minyak bumi, industri pengolahan non-migas, dan industri pengilangan gas alam cair

<sup>4</sup> Perhitungan dan nilai tambah untuk sub sektor industri besar/ sedang digunakan pendekatan produksi, dan untuk output & nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi

dominan melambatnya pertumbuhan sektor ini. Sinyal positif baru terlihat pada tw.III-2007, saat pemerintah memperlihatkan keseriusan terhadap status hukum Batam, Bintan & Karimun (BBK) dengan menjadikannya sebagai kawasan Free-Trade-Zone (FTZ) melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2007 yang baru disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang. Kesiapan pemerintah daerah dan pusat dalam memanfaatkan momentum ini akan memungkinkan Kepri, khususnya Batam, Bintan & Karimun (BBK) berkembang dengan cepat dan mampu bersaing dengan zona perdagangan bebas negara lain, seperti Malaysia, Cina, dan Singapura.

**GRAFIK 1.6 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.III-2005 s/d. TW.III-2007**



Sumber : BPS data diolah

Sebagaimana diuraikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan beberapa upaya peningkatan sarana infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2007, diantaranya adalah: pembangunan jalan baru sepanjang 80 km<sup>2</sup>, jembatan sepanjang 748 m<sup>2</sup> dan lokasinya menyebar di seluruh Kab/Kota. Di samping pembangunan jalan dan jembatan, juga telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 279 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2007 akan ditambah sebanyak 332 km<sup>2</sup>. Selain itu, untuk peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan sepanjang 21 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2007 akan ditambah sepanjang 20 km<sup>2</sup>. Diharapkan melalui pembangunan jalan dan jembatan tersebut dapat meminimalisasi keterisolasian daerah terpencil dan meningkatkan pelayanan transportasi darat antara beberapa daerah seperti di Lingga dan Natuna.

Adapun rencana pengembangan perekonomian untuk Kab. Karimun pada tahun 2007 terkait dengan sektor industri adalah rencana reklamasi beberapa wilayah yang diperuntukan

untuk kawasan industri *shipyard*, antara lain di Pulau Baran-Pulau Kera, Tg. Buluh Kasap-Tg. Tiram, Tg. Pengaru-Parit Rampak, dan Tg. Sebatak.

#### **1.4.1.2 Komponen Pertambangan**

Sumbangan sektor pertambangan terhadap total PDRB sedikit mengalami penurunan sejak dibandingkan tw.II-2007. Kontribusi sektor pertambangan pada tw.III-2007 sebesar 10,24%, dimana pada tw.II-2007 tercatat 10,33%. Sub-sektor penyumbang terbesar berasal dari kegiatan pertambangan migas dengan *share* 9,01%, diikuti pertambangan non-migas 0,79% dan penggalian 0,43%. Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas terbesar untuk PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna. Di samping itu, kontribusi juga diberikan oleh wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Terdapat 3 (tiga) bahan tambang/galian utama yang dihasilkan di daerah ini antara lain : pertambangan timah, pertambangan granit, dan penggalian pasir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun (data yang diperoleh s/d tahun 2002), produksi pertambangan granit yang tercatat pada tahun 2002 adalah sebanyak 5.103.690.000 m<sup>3</sup> dengan jumlah iuran sebanyak Rp.15.774.603.731,- Untuk produksi timah, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 6.237.300 ton. Sementara itu, penggalian pasir darat tercatat sebanyak 1.359.450.000 ton, sedangkan penggalian pasir laut belum ada data yang tersedia. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Perimbangan yang meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan penetapan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil migas berdasarkan Kepmendagri Nomor 36 Tahun 2005 dan adanya peningkatan PAD akibat perbaikan pelayanan di bidang migas. Selain itu, kenaikan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan formula perhitungan DAU yang saat ini telah memperhitungkan luas lautan dan panjang garis pantai yang tertuang dalam Deklarasi Bintang pada bulan September 2006. Sebagai gambaran, pada tahun 2005 pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.371,72 miliar, sedangkan pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp.911,15 miliar (meningkat 145,12%).

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka APBD Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 APBD Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai Rp.489 miliar, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp.1,1 triliun dan pada tahun 2007 sebesar Rp.1,56 triliun. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau menduduki posisi ke-10 berdasarkan jumlah APBD Provinsi secara nasional, dimana posisi terbesar adalah DKI Jakarta dengan jumlah APBD mencapai Rp.21,3 triliun dan yang terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp.362,9 miliar.

### 1.4.1.3 Komponen Perdagangan

Keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*) disebabkan oleh letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada di jalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya alam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Atas keunggulan tersebut, sektor perdagangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Kepri. Beberapa daerah yang menjadikan perdagangan sebagai sektor ekonomi unggulan diantaranya Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Kontribusi sektor perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III-2007 adalah sebesar 8,17% yang terbagi dalam 3 sub-sektor, yaitu: sub-sektor perdagangan (6,94%), sub-sektor hotel (0,76%), dan sub-sektor restoran (0,47%).

Ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, menjadikan pulau Bintan memiliki 3 (tiga) pemerintahan, yaitu sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kota ini memiliki beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini. Di samping itu, sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan dan ini turut mempengaruhi sub-sektor perdagangan diantaranya sub-sektor hotel dan sub-sektor restoran.

Letak geografis yang strategis pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan menjadi salah satu potensi yang dimiliki Tanjung Pinang untuk turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan. Kegiatan perdagangan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Tanjung Pinang karena terbatasnya tanaman yang dapat tumbuh di daerah yang memiliki tekstur tanah pasir berlempung, seperti tanaman hortikultura, palawija, dan perkebunan. Pada tahun 2001, luas lahan tanam adalah 448 ha, namun pada tahun berikutnya turun 71 ha karena alih fungsi menjadi daerah permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan maka sebagian besar kebutuhan pangan tersebut diperoleh dari perdagangan antarpulau. Sayur-sayuran dipasok dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Pekanbaru. Kebutuhan beras diperoleh dari Padang selain Thailand dan Myanmar, dan barang kelontong dan bahan bangunan disuplai dari Jakarta.

#### 1.4.1.4 Komponen Keuangan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 5,53% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tw.III-2007. Sub-sektor Bank<sup>5</sup> memberikan sumbangan sebesar 3,75%, sub-sektor sewa bangunan sebesar 1,55%, sub-sektor lembaga keuangan tanpa bank sebesar 0,18% dan sub-sektor jasa perusahaan berkontribusi sebesar 0,04%. Perkembangan perbankan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren peningkatan, ditunjukkan dengan membaiknya indikator-indikator utama perbankan, seperti jumlah, total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta jumlah kredit yang disalurkan.

#### 1.4.1.5 Komponen Pertanian

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor perikanan, sesuai dengan karakteristik daerahnya sebagai wilayah perairan. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian pada pembentukan PDRB provinsi sebesar 5,07% pada triwulan III-2007 dengan rincian sub-sektor perikanan sebesar 3,69%, sub-sektor peternakan sebesar 0,76%, sub-sektor perkebunan sebesar 0,25%, sub-sektor tanaman pangan sebesar 0,25%, dan sub-sektor kehutanan sebesar 0,06%. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala pengembangan potensi tersebut seperti masih maraknya praktek *illegal fishing* dan *illegal logging* serta rusaknya terumbu karang yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem alam.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk memajukan taraf hidup dan perekonomian kalangan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepri. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri mengalokasikan dananya untuk penguatan modal kalangan nelayan, tambak, dan budi daya ikan. Adapun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2007 antara lain:

- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya,
- Penguatan modal nelayan dan pembudidaya ikan melalui bantuan dana bergulir,
- Pembangunan pabrik es,
- Revitalisasi pelabuhan perikanan,
- Revitalisasi TPI
- DED pelabuhan perikanan.

Salah satu daerah Dati-II di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan adalah Kabupaten Karimun, dimana di samping memiliki lahan

---

<sup>5</sup> Meliputi Bank Indonesia (BI), bank umum pemerintah & swasta serta BPR

yang subur, sebesar 87% atau seluas 6.460 km<sup>2</sup> wilayah tersebut dikelilingi oleh laut sehingga sangat potensial untuk pengembangan industri yang berbasis perikanan, antara lain: budidaya rumput laut, tambak udang, pengolahan tepung ikan, dan kerambah ikan. Sebagian hasil laut yang dihasilkan tersebut sangat mendukung untuk pengembangan peternakan guna kelangsungan pakan ternak itik di daerah tersebut. Berdasarkan PDRB Karimun pada tahun 2003, sumbangan sub-sektor perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,79% atau sebesar Rp.60,04 miliar. Untuk terus meningkatkan sektor perikanan di wilayah Karimun, maka Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki program dan kegiatan pembangunan, yang terdiri dari:

- a. Penguatan modal untuk petani ikan/nelayan melalui pinjaman lunak swamitramina, dengan total anggaran Rp.3 miliar.
- b. Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- c. Pencetakan lahan tambak udang dan operasional 5 Ha, dengan total anggaran Rp.4 miliar.
- d. Bantuan pengadaan jaring udang dan jaring tenggiri bagi masyarakat pesisir, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- e. Dukungan peralatan untuk balai benih udang, dengan total anggaran Rp.500 juta.

Sementara itu, Kabupaten Bintan juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan peternakan. Pada tahun 2006, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri telah mengajukan beberapa program terkait sektor tersebut diatas. Antara lain adalah program penggemukan 1.000 ekor sapi unggulan dengan alokasi dana mencapai Rp.10 miliar, serta pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor.

Rencana Pemerintah Kota Batam untuk mengembangkan potensi perikanan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan pengembangan pelabuhan perikanan di Pulau Nipah antara PT. Mandra Guna Gema Sejati dengan Pemko Batam di Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan – Jakarta, yang mencakup rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan, dan lingkungan untuk kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu juga PT. Mandra Guna Gema Sejati akan menyiapkan dan memfasilitasi pembangunan sarana prasarana penunjang pelabuhan perikanan dan fasilitas komersil, fasilitas pembinaan nelayan, pembangunan fasilitas kantor pelayanan fungsi pemerintahan, membangun tempat pelelangan dan pembongkaran ikan sesuai kapasitas kebutuhan. Di samping itu juga membangun fasilitas mutu hasil perikanan, menyusun program pengembangan kawasan bahari di Barelang secara terpadu serta menyampaikan laporan perkembangan pembangunan dan operasional pelabuhan secara periodik kepada Pemko Batam.

### **1.5 Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam**

Nilai total ekspor non-migas dari wilayah kerja Batam dalam periode Januari s/d Agustus 2007 mencapai US\$ 4.581,12 juta. Sementara itu total impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d Agustus 2007 sebesar US\$5.672,68 juta. Dengan demikian, wilayah Batam periode Jan-Agustus 2007 tercatat sebagai net-importir untuk produk non-migas sebesar US\$ 1.091,56 juta. Secara nasional, nilai ekspor non-migas Agustus 2007 tercatat sebesar US\$7,95 milyar. Sementara itu nilai impor nasional mencapai US\$6,65 milyar.

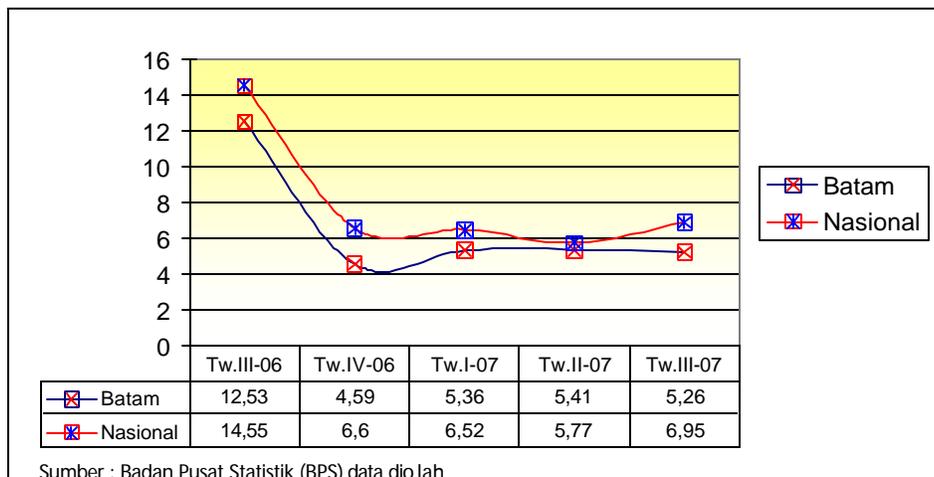
Sebagai daerah ekonomi khusus, wilayah Batam pada dasarnya lebih berorientasi untuk ekspor, dimana proses masuknya barang ke dalam wilayah pabean RI melalui Batam tidak dicatat sebagai impor. Besarnya nilai impor sampai dengan Agustus 2007 disebabkan kenaikan impor komponen *Capital Goods Parts and Accessories* dan *Transport Equipment (industrial)* dalam nilai yang signifikan pada periode Mei-Agustus 2007. Kenaikan impor komponen tersebut diperkirakan karena meningkatnya kebutuhan akan sparepart mesin-mesin industri dan sparepart kendaraan industri dalam rangka *maintenance* berkala.

## BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

### 2.1 KAJIAN UMUM

Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang diukur Kota Batam secara kuartalan sampai dengan triwulan III tahun 2007 adalah sebesar 2,14% (qtq), atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2007 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,06%. Laju inflasi Batam secara tahunan pada triwulan III tahun 2007 tercatat sebesar 5,26% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan laju inflasi nasional triwulan III tahun 2007 sebesar 6,95% (yoy).

**GRAFIK 2.1 – PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN BATAM & NASIONAL**



Berdasarkan kontribusinya, kelompok bahan makanan merupakan penyumbang utama dalam pembentukan angka inflasi yaitu sebesar 1,43%. Sementara itu kelompok lain memberikan sumbangan inflasi secara total sebesar 0,74%, dimana kontributor utama adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (0,35%) dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar (0,30%). Dari sisi komoditas barang dan jasa yang dominan menyumbang inflasi antara lain sayur-sayuran sebesar 0.56%, jasa pendidikan sebesar 0,35%, daging sebesar 0,28%, bumbu-bumbuan sebesar 0,21%, biaya tempat tinggal sebesar 0,20%, telur dan susu sebesar 0,17%, lemak dan minyak sebesar 0,10%. Sedangkan padi-padian, minuman, dan tembakau masing-masing menyumbang sebesar 0,02%.

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Batam

KELOMPOK	Triwulan II-2007		Triwulan III-2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
I Bahan Makanan	-2,39	-0,61	5,07	1,43
II Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,27	0,04	0,32	0,05
III Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar	0,94	0,13	0,86	0,22
IV Sandang	0,40	0,02	1,73	0,08
V Kesehatan	0,91	0,02	0,42	0,01
VI Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,06	0,00	9,85	0,35
VII Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,02	0,00	0,16	0,03
<b>INFLASI</b>	<b>-0,40</b>		<b>2,14</b>	

Sumber : BPS data diolah

Secara triwulanan, laju inflasi juga mengalami peningkatan yang dipengaruhi terutama oleh meningkatnya laju inflasi untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dari sebesar 0,06% (qtq) pada triwulan II tahun 2007 menjadi 9,85% (qtq) pada triwulan laporan. Peningkatan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga terutama disebabkan oleh inflasi di sektor jasa pendidikan terutama untuk sekolah menengah pertama yang mengalami inflasi sebesar 42,84%.

## 2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

Dilihat dari komoditasnya, penyumbang utama inflasi pada triwulan III 2007 sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan antara lain daging ayam, telur ayam, bayam, kacang panjang, kangkung, ketimun, bawang merah, cabe merah dan minyak goreng. Sementara itu, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan sumbangan deflasi adalah tomat sayur, apel, sotong, kembung, terong panjang, cumi-cumi, tauge, lele, kerang, dan kayu balokan.

Tabel 2.3. Sepuluh Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Batam

No.	Komoditas	Sumbangan	Inflasi	Komoditas	Sumbangan	Inflasi
1.	Daging Ayam	0,2387	15,89	Tomat Sayur	-0,0257	-8,33
2.	Bayam	0,1968	42,91	Apel	-0,0217	-3,50
3.	Kontrak Rumah	0,1338	7,90	Sotong	-0,0214	-3,99
4.	Kangkung	0,1306	37,61	Kembung	-0,0181	-7,72
5.	Kacang Panjang	0,1257	60,98	Terong Panjang	-0,0071	-8,62
6.	Telur Ayam	0,1233	15,45	Cumi-cumi	-0,0067	-2,78

7.	Cabe Merah	0,1047	10,45	Tauge	-0,0048	-4,01
8.	Minyak Goreng	0,0992	6,53	Lele	-0,0024	-1,03
9.	Bawang Merah	0,0804	20,89	Kerang	-0,0011	-0,90
10.	Ketimun	0,0498	44,81	Kayu Balokan	-0,0010	-2,30

Sumber : BPS data diolah

### 2.2.1 Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada triwulan III 2007 mengalami inflasi sebesar 5,07% (q-t-q). Berdasarkan sub kelompoknya inflasi tertinggi berasal dari sayur-sayuran sebesar 18,61% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,56%(q-t-q), diikuti inflasi sub kelompok daging dan hasilnya sebesar 9,02% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,28% (q-t-q) dan inflasi sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 8,74% (q-t-q) dengan sumbangan 0,21% (q-t-q) terhadap pembentukan inflasi Kota Batam.

Berdasarkan komoditasnya, daging ayam merupakan penyumbang terbesar pembentukan inflasi Kota Batam pada triwulan laporan sebesar 0,24% (q-t-q) disusul bayam sebesar 0,19% (q-t-q) dan kangkung 0,13% (q-t-q). Sedangkan ditinjau dari perkembangan harga secara triwulanan, komoditas daging ayam, bayam dan kangkung mengalami kenaikan harga masing-masing sebesar 15,89% (q-t-q), 42,91% (q-t-q) dan 30,84% (q-t-q).

Di sisi lain, komoditas tomat sayur merupakan penyumbang deflasi terbesar pada triwulan laporan yaitu sebesar 0,026% (q-t-q) disusul apel dan sotong sebesar 0,021% (q-t-q) dan 0,018% (q-t-q). Sedangkan ditinjau dari perkembangan harga secara triwulanan, komoditas tomat sayur mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 8,33% (q-t-q), 3,50% (q-t-q) dan 3,99% (q-t-q).

### 2.2.2 Kelompok Makanan Jadi

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan III 2007 mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,32% (q-t-q) atau dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,90% (y-o-y). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada kelompok minuman tidak beralkohol sebesar 1,06% (q-t-q) dengan sumbangan 0,027% (q-t-q) diikuti oleh sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,39% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,026% (q-t-q).

Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah rokok kretek filter, gula pasir dan minuman ringan masing-masing sebesar 0,22% (q-t-q), 0,016% (q-t-q), dan 0,011% (q-t-q), dengan inflasi masing-masing sebesar 0,68% (q-t-q), 2,04% (q-t-q) dan 4,51% (q-t-q).

### **2.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar**

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan laporan mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,86% (q-t-q) dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,26% (y-o-y). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok biaya tempat tinggal sebesar 1,42% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,21% (q-t-q), diikuti oleh sub kelompok penyelenggaraan tempat tinggal dengan inflasi sebesar 0,25% (q-t-q) dan sumbangan sebesar 0,005% (q-t-q).

Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah kontrak rumah, sewa rumah dan besi beton masing-masing sebesar 0,134% (q-t-q), 0,062% (q-t-q) dan 0,004% (q-t-q) dengan inflasi sebesar 7,90% (q-t-q), 0,56% (q-t-q) dan 2,54% (q-t-q).

### **2.2.4 Kelompok Sandang**

Kelompok sandang pada triwulan III 2007 mengalami inflasi sebesar 1,73% (q-t-q) dengan laju inflasi tahunan sebesar 5,02% (y-o-y). Inflasi pada kelompok sandang pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,40% (q-t-q). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 7,56% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,075%, diikuti oleh sub kelompok sandang wanita dengan inflasi sebesar 0,04% (q-t-q) dan sumbangan sebesar 0,0004% (q-t-q). Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah emas dan perhiasan sebesar 0,074% (q-t-q) dengan inflasi sebesar 9,30% (q-t-q).

### **2.2.5 Kelompok Kesehatan**

Kenaikan harga pada kelompok kesehatan di Kota Batam pada triwulan III tahun 2007 sebesar 0,42% (q-t-q) dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,71% (y-o-y). Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,91% (q-t-q). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi hanya dialami oleh sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika yang tercatat sebesar 0,75% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,012% (q-t-q). Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah sabun mandi sebesar 0,009% dengan inflasi sebesar 3,34% (q-t-q).

### **2.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga**

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 9,85% (q-t-q) dengan laju inflasi tahunan sebesar 10,40% (y-o-y). Inflasi kelompok pendidikan, kesehatan, dan olahraga pada triwulan III 2007 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,06% (q-t-q). Kenaikan angka inflasi ini disebabkan karena pembukaan tahun ajaran baru sekolah dan penerimaan siswa baru.

Berdasarkan sub kelompoknya, kenaikan harga hanya terjadi pada sub kelompok jasa pendidikan yang tercatat sebesar 17,88% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,353% (q-t-q). Sedangkan dari sisi komoditas, penyumbang inflasi untuk kelompok ini adalah jasa pendidikan untuk sekolah dasar diikuti SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 0,153% (q-t-q), 0,152% (q-t-q) dan 0,049% (q-t-q) dengan inflasi sebesar 20,55% (q-t-q), 42,84% (q-t-q), dan 20,55% (q-t-q).

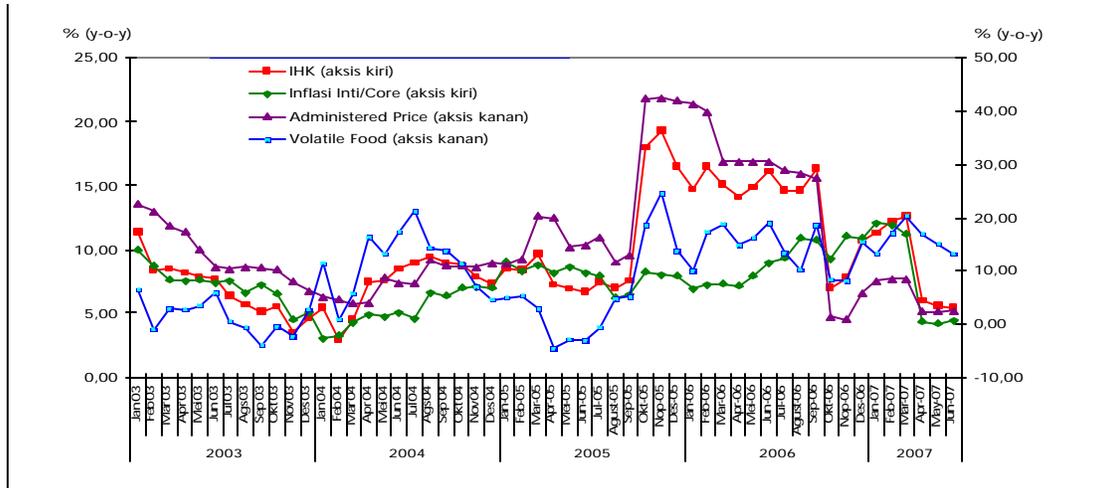
### **2.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan**

Kenaikan harga yang terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Kota Batam pada triwulan III 2007 adalah sebesar 0,16% (q-t-q) dengan laju inflasi tahunan sebesar 0,65% (y-o-y). Inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,02% (q-t-q). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok transportasi sebesar 0,22% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,029%. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, inflasi tertinggi tercatat pada accu sebesar 8,89% (q-t-q), diikuti oleh bahan pelumas/oli yang mengalami kenaikan harga sebesar 1,72% (q-t-q).

## **2.3 DISAGREGASI INFLASI**

Hasil perhitungan disagregasi inflasi di Kota Batam selama triwulan III 2007 menunjukkan bahwa inflasi inti (*core inflation*) secara tahunan mengalami penurunan namun secara triwulanan mengalami kenaikan. Inflasi volatile food baik secara tahunan maupun triwulanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebaliknya inflasi *administred prices* baik secara tahunan maupun triwulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik. 2.3. Perkembangan Inflasi Kota Batam**



Sumber : BPS data diolah

**2.3.1 Faktor Fundamental**

Inflasi inti (*core inflation*) Kota Batam yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental tercatat secara tahunan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,39% (y-o-y) menjadi sebesar 4,04% (y-o-y) pada triwulan laporan. Namun secara triwulanan inflasi inti Kota Batam mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,48% (q-t-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22% (q-t-q).

**Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Batam**

KATEGORI	Triwulan II-2007		Triwulan III-2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
Inflasi Inti (Core Inflation)	0,22	0,06	2,48	1,28
Inflasi Non Inti (Non Core Inflation)	-0,94	-0,46	1,81	0,88
- Administered Price	0,34	0,07	0,11	0,03
- Volatile Food	-1,98	-0,53	3,23	0,86
Food	-1,36	-0,57	3,19	1,48
Non Food	0,53	0,17	1,27	0,69
Traded	-0,48	-0,48	2,01	1,14
Non Traded	-3,72	0,08	-1,55	1,03
<b>INFLASI</b>	<b>-0,40</b>		<b>2,17</b>	

Sumber : BPS data diolah

### 2.3.1.1 Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi inflasi masyarakat pada triwulan laporan masih tetap terjaga terkait dengan stabilitas nilai tukar sampai dengan triwulan III 2007 masih tetap berada pada level yang stabil. Selain itu tidak adanya rencana pemerintah menaikkan harga komoditas strategis seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia ikut memperbaiki ekspektasi inflasi masyarakat.

### 2.3.1.2 Eksternal

Pada triwulan laporan, tekanan inflasi yang bersumber dari sisi eksternal cenderung tidak terlalu besar. Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang sempat membuat pasar keuangan regional Asia bergejolak dan nilai rupiah terkoreksi, sampai dengan triwulan laporan tidak terlalu menekan perekonomian Indonesia.

## 2.3.2 Faktor Non Fundamental

Inflasi non inti Kota Batam pada triwulan laporan mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,81% (q-t-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,94% (q-t-q). Kenaikan inflasi Kota Batam salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga untuk barang-barang *volatile food*. Sedangkan inflasi *administred price* justru mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

### 2.3.2.1 Volatile food

Inflasi *volatile food* Kota Batam pada triwulan laporan secara tahunan mengalami kenaikan dari sebesar 13,13% (y-o-y) pada triwulan II 2007 menjadi sebesar 15,47% (y-o-y) pada triwulan laporan. Sedangkan secara triwulanan, setelah sempat mengalami deflasi pada triwulan II 2007 sebesar 1,98% (q-t-q), inflasi *volatile food* pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 3,23% (q-t-q). Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan salah satu komoditas yang termasuk dalam *volatile food* yaitu daging ayam yang mengalami inflasi sebesar 15,89% (q-t-q).

### 2.3.2.2 Administred price

Inflasi *administered prices* secara tahunan mengalami penurunan dari sebesar 2,53% (y-o-y) pada triwulan II 2007 menjadi sebesar 0,81% (y-o-y) pada triwulan III 2007. Secara triwulanan, inflasi *administred prices* juga mengalami penurunan dari 0,34% (q-t-q) pada triwulan II 2007 menjadi sebesar 0,11% (q-t-q) pada triwulan laporan. Penurunan tingkat inflasi tersebut terkait

dengan kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga komoditas strategis seperti bahan bakar minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

## BAB III

# PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

### 3.1 KONDISI BANK UMUM

Kondisi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III 2007 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil terhadap periode sebelumnya. Beberapa indikator-indikator perbankan, seperti total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

Indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.III 2007 menunjukkan peningkatan. Jumlah jaringan kantor Bank Umum sebanyak 44 kantor pada triwulan laporan, sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 12 (sebelas) kantor. Selain itu, terdapat 3 BPR yang telah memperoleh ijin prinsip. Masing-masing BPR yang telah memperoleh ijin prinsip tersebut adalah 1 BPR berlokasi di Kota Batam, 1 BPR berlokasi di Kota Tanjung Pinang, dan 1 BPR berlokasi di Kabupaten Bintan.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika dibanding tw.II 2007 meskipun dengan persentasi yang kurang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan cukup tinggi. Kinerja perbankan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2007 terhitung baik, dimana *asset*, DPK, kredit dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, angka *Non Performing Loans* (NPLs) masih berada dalam batas toleransi. Pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih besar daripada penghimpunan dana menunjukkan sudah membaiknya fungsi intermediasi oleh perbankan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan LDR pada triwulan III 2007 sudah mulai menunjukkan peningkatan, dimana tingkat LDR bank umum pada triwulan laporan sebesar 57,24%. Peningkatan penyaluran kredit oleh dunia perbankan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pendanaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, dari sisi kolektibilitas kredit juga menunjukkan indikator yang menggembirakan dimana terjadi penurunan pada tingkat NPLs di wilayah kerja KBI Batam, yaitu dari 4,28% pada tw.II 2007 menjadi 3,47% pada triwulan laporan. Penurunan NPLs tersebut terutama disumbangkan dari tingkat NPLs perbankan di daerah Batam dan Tanjung Pinang. Penurunan total nilai NPLs di wilayah kerja KBI Batam ini dipengaruhi oleh performa dunia usaha yang sudah mulai membaik.

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar Rp.8,95 triliun atau 66,33% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar Rp.6,37 triliun atau 82,51% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

**TABEL 3.1 – PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(juta rupiah)

Indikator	Periode				
	2006			2007	
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw. II	Tw. III
<b>1. Jaringan BU</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
a. Batam	24	26	27	27	28
b. Tj. Pinang	11	11	11	11	13
c. Karimun	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1
<b>2. Jaringan BPR</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
a. Batam	7	8	8	9	9
b. Tj. Pinang	2	2	2	2	2
c. Karimun	1	1	1	1	1
<b>3. Total Asset</b>	<b>13.115.164</b>	<b>14.592.742</b>	<b>14.617.078</b>	<b>15.106.938</b>	<b>15.851.731</b>
a. Batam	9.421.420	9.966.611	10.181.336	10.478.486	11.155.797
b. Tj. Pinang	2.650.857	3.511.073	3.320.778	3.730.356	3.897.759
c. Dati II lain	1.042.887 *)	1.115.058	1.114.964	898.096	798.175
<b>4. Total DPK</b>	<b>11.134.372</b>	<b>12.420.268</b>	<b>12.462.137</b>	<b>12.795.065</b>	<b>13.497.036</b>
a. Batam	7.606.786	7.979.175	8.159.309	8.323.007	8.951.957
b. Tj. Pinang	2.477.426	3.352.073	3.182.499	3.562.510	3.726.971
c. Dati II lain	1.050.160	1.089.020	443.931	909.548	818.108
<b>5. Total Kredit</b>	<b>6.258.180</b>	<b>6.666.355</b>	<b>6.713.064</b>	<b>7.228.680</b>	<b>7.726.078</b>
a. Batam	5.266.622	5.588.850	5.622.513	6.025.843	6.374.627
b. Tj. Pinang	819.222	897.686	898.102	985.475	1.111.212
c. Dati II lain	172.336	179.819	192.449	217.362	240.239
<b>6. LDR (%)</b>	<b>56,21</b>	<b>53,67</b>	<b>53,87</b>	<b>56,50</b>	<b>57,24</b>
a. Batam	69,24	70,04	68,91	72,40	71,21
b. Tj. Pinang	33,07	26,78	28,22	27,66	29,82
c. Karimun	39,50	39,10	33,11	36,62	35,16
d. Natuna	5,07	5,04	6,72	11,75	20,58
<b>7. NPLs (%)</b>	<b>4,83</b>	<b>4,34</b>	<b>4,46</b>	<b>4,28</b>	<b>3,47</b>
a. Batam	3,62	4,43	4,19	4,01	3,16
b. Tj. Pinang	12,76	3,66	5,95	5,87	5,18
c. Karimun	4,87	5,98	6,86	6,28	8,48
d. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06

Sumber : Bank Indonesia

### 3.1.1 TOTAL ASSET BANK UMUM

Kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan, seperti tercermin pada pertumbuhan total aset bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang didukung oleh pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Sampai dengan tw.III 2007, total aset bank umum mencapai Rp.15,85 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,93% dibanding tw.II 2007 yang tercatat sebesar Rp. 15,11 triliun, sedangkan secara tahunan (y-o-y) terdapat peningkatan sebesar 20,87%.

Berdasarkan Dati II, kegiatan perekonomian dan perbankan masih terkonsentrasi di Kota Batam, dimana jumlah total *asset* perbankan sebagian besar masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada tw.III 2007 sebesar Rp.11,16 triliun atau 70,38% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar Rp.3,89 triliun atau 47,04% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar Rp.798 miliar (5,04%).

**TABEL 3.2 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET PERBANKAN**

(miliar rupiah)

Lokasi	2006		2007			Pert. (%)	
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	9.421	9.967	10.181	10.478	11.156	6,46	18,41
Wil.Tj.Pinang	2.651	3.511	3.321	3.730	3.898	4,49	47,04
KepIn Riau*)	1.043	1.115	1.115	898	798	-11,13	-23,46
<b>Total</b>	<b>13.115</b>	<b>14.593</b>	<b>14.617</b>	<b>15.106</b>	<b>15.851</b>	<b>4,93</b>	<b>20,87</b>

Sumber : Bank Indonesia

\*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Peningkatan total *asset* terbesar triwulanan (q-t-q) terdapat di wilayah Kota Batam sebesar 4,49%, sedangkan secara tahunan tahunan (y-o-y) peningkatan terbesar terdapat di Tanjung Pinang (47,04%). Penurunan *asset* yang sebelumnya terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada triwulan II 2007 sebesar -19,45% semakin menurun pada triwulan laporan menjadi Rp.798 atau menurun sebesar -11,13% (q-t-q).

### 3.1.2 DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM

Sampai dengan tahun 2007, jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Umum masih terus mengalami pertumbuhan, dimana pada triwulan III 2007 jumlah dana masyarakat mencapai Rp.13,49 triliun atau meningkat sebesar Rp.702 milyar (5,49%) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.12,79 triliun.

Dibandingkan dengan triwulan II 2007 giro merupakan jenis simpanan yang mengalami pertumbuhan terbesar yang mencapai 8,19% (Rp.459 miliar) dan diikuti oleh tabungan sebesar 7,59% (Rp.304 triliun). Sedangkan simpanan dalam bentuk deposito justru mengalami penurunan sebesar -2,02% (Rp.65 miliar).

Indikator tersebut di atas juga menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran minat masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk menghimpun dananya pada jenis simpanan yang *liquid* dimana pada periode sebelumnya simpanan masyarakat di wilayah kerja KBI Batam dalam

bentuk deposito mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun 2006 sebesar 54,61%. Secara nominal simpanan giro masih memiliki porsi terbesar sebesar 43,79%. Dominasi sektor industri dan sektor perdagangan pada perekonomian Kota Batam turut mempengaruhi jenis transaksi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan masyarakat akan dana likuid serta transaksi ekonomi yang membutuhkan waktu singkat menyebabkan simpanan berbentuk giro memiliki porsi terbesar terhadap total simpanan masyarakat di perbankan.

*Trend* perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari tw.I 2005 sampai dengan tw.III 2007 dapat dilihat tabel 3.5.

**TABEL 3.5 – PENGHIMPUNAN DANA BANK UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(Juta Rupiah)

Keterangan	2006				2007	
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3
<b>Jenis Simpanan:</b>	<b>10.250.252</b>	<b>11.134.372</b>	<b>12.420.268</b>	<b>12.462.137</b>	<b>12.795.065</b>	<b>13.497.036</b>
- Giro	4.435.878	4.988.060	5.086.038	5.057.691	5.602.987	6.061.732
- Tabungan	3.089.243	3.211.560	3.828.176	3.844.020	3.999.732	4.303.432
- Deposito	2.725.131	2.934.752	3.506.054	3.560.426	3.196.346	3.131.872
<b>Jenis Bank:</b>						
<b>Bank Pemerintah</b>	<b>3.595.272</b>	<b>3.464.724</b>	<b>3.897.504</b>	<b>3.893.517</b>	<b>4.009.818</b>	<b>4.273.991</b>
- Giro	1.220.980	1.037.079	1.233.846	1.160.015	1.219.522	1.302.268
- Tabungan	1.540.704	1.560.522	1.770.691	1.836.480	1.921.682	2.071.458
- Deposito	833.588	867.123	892.967	897.022	868.614	900.265
<b>BPD Riau</b>	<b>1.263.075</b>	<b>1.780.649</b>	<b>2.237.652</b>	<b>1.949.614</b>	<b>1.578.679</b>	<b>1.496.834</b>
- Giro	986.016	1.445.086	1.325.392	1.077.597	867.026	986.116
- Tabungan	135.654	165.738	355.596	196.597	232.174	248.413
- Deposito	141.405	169.825	556.664	675.420	479.479	262.305
<b>Bank Swasta</b>	<b>5.391.905</b>	<b>5.888.999</b>	<b>6.285.112</b>	<b>6.619.006</b>	<b>7.206.568</b>	<b>10.726.211</b>
- Giro	2.228.882	2.505.895	2.526.800	2.820.079	3.516.439	3.773.348
- Tabungan	1.412.885	1.485.300	1.701.889	1.810.943	1.841.876	4.983.561
- Deposito	1.750.138	1.897.804	2.056.423	1.987.984	1.848.253	1.969.302

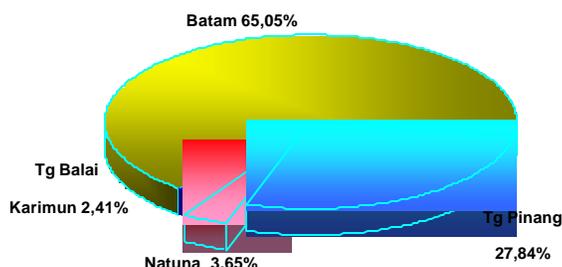
Sumber : Bank Indonesia Batam

Kelompok Bank Swasta masih mendominasi dunia usaha perbankan di wilayah kerja KBI Batam dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Swasta sebesar Rp.10,73 triliun atau 79,47% dari total DPK di wilayah kerja KBI Batam. Demikian pula pertumbuhan DPK terbesar terdapat pada kelompok Bank Swasta dibandingkan kelompok Bank Pemerintah. Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh kelompok Bank Swasta sebesar 48,84% (q-t-q), sedangkan dana yang dihimpun oleh kelompok

Bank Pemerintah meningkat sebesar 6,59%. Sementara itu, BPD Riau justru mengalami penurunan penghimpunan DPK sebesar 82 miliar (-5,18%).

Dari segi wilayah kota Batam masih tetap sebagai kontributor terbesar dari penghimpunan DPK yaitu sebesar Rp.8,95 triliun (66,33%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar Rp.3,73 triliun (27,61%), Tanjung Balai Karimun sebesar Rp.493 miliar (3,65%) dan Natuna sebesar Rp.325 miliar (2,40%).

**GRAFIK 3.2 – PERBANDINGAN TOTAL DPK BANK UMUM TRIWULAN III-2007**



Sumber : Bank Indonesia

### 3.1.3 KREDIT BANK UMUM

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan III-2007 meningkat sebesar Rp.1,47 triliun atau tumbuh sebesar 23,46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006 (yoy). Peningkatan penyaluran kredit tersebut dipengaruhi oleh target penyaluran kredit bank yang menjelang akhir tahun harus dipenuhi, sehingga upaya penyaluran kredit oleh perbankan lebih gencar dibandingkan dengan periode semester awal tahun 2007. Selain itu, penurunan suku bunga BI Rate yang secara gradual menurun dari awal tahun hingga posisi saat ini sebesar 8,25% ikut mempengaruhi tingginya pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan tw.II-2007, kredit yang disalurkan oleh Bank Umum meningkat sebesar Rp.497 miliar (6,88%), dimana pertumbuhan terbesar terdapat pada kelompok Bank Pemerintah (12,54%) sedangkan kelompok Bank Swasta meningkat sebesar 1,11%. Jumlah penyaluran kredit oleh Bank Umum pada triwulan laporan meningkat terhadap triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hal tersebut berdampak pada peningkatan tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Umum yaitu dari 56,50% (tw.II 2007) menjadi 57,24% (tw.III 2007).

**TABEL 3.6 – PERKEMBANGAN OUTSTANDING KREDIT BANK UMUM**

(dalam miliar rupiah)

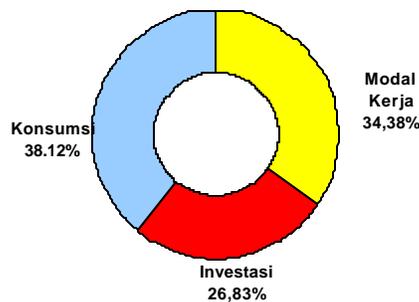
Keterangan	2006		2007			Prtmbn (y-o-y)
	Tw.3	Tw.4	Tw. I	Tw.2	Tw.3	
<b>TOTAL</b>	<b>6.258.180</b>	<b>6.666.355</b>	<b>6.713.064</b>	<b>7.228.680</b>	<b>7.726.078</b>	<b>23,46%</b>
- Bank Pemerintah*)	3.256.116	3.357.758	3.410.296	3.650.233	4.108.000	26,16%
- Bank Swasta	3.002.064	3.308.597	3.302.768	3.578.447	3.618.078	20,52%

Sumber : Bank Indonesia

\*) termasuk BPD Riau

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp.2,99 triliun atau 38,79% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp.2,66 triliun (34,38%) dan Rp.2,07 triliun (26,83%). Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.3.

**GRAFIK 3.3  
KOMPOSISI PENYALURAN  
KREDIT DI WILKER  
KBI BATAM TRIWULAN III-2007**



Kelompok kredit konsumsi memiliki porsi terbesar pada penyaluran kredit Bank Umum pada tw.III 2007. Sementara itu, porsi terkecil dimiliki oleh

kelompok kredit investasi yaitu sebesar 26,83% dimana besaran ini mengalami penurunan terhadap triwulan sebelumnya. Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada tw.III 2007 terdapat pada kredit untuk jenis kredit investasi yang meningkat sebesar Rp.179 miliar atau 9,42% terhadap tw.II 2007. Sementara itu kredit modal kerja meningkat sebesar Rp.171 miliar (6,84%).

Sedangkan kredit konsumsi meningkat sebesar Rp.149 miliar (5,22%). Peningkatan pembiayaan kredit investasi dan kredit modal kerja oleh bank umum menunjukkan bahwa dunia usaha di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mulai tumbuh dengan baik.

Meskipun sebagian besar penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk konsumsi namun dari sisi pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumsi.

**TABEL 3.7 – PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BANK UMUM  
TRIWULAN III 2007**

*( miliar rupiah)*

KETERANGAN	2006		2007		
	Tw. III	Tw. IV	Tw.I	Tw.II	Tw. III
<b>Kredit atas Jenis:</b>	<b>6.258.180</b>	<b>6.666.355</b>	<b>6.713.064</b>	<b>7.228.680</b>	<b>7.726.078</b>
- Modal kerja	2.299.214	2.366.633	2.303.606	2.486.151	2656218
- Investasi	1.528.315	1.758.377	1.764.400	1.894.140	207 2646
- Konsumsi	2.430.651	2.541.345	2.645.058	2.848.389	2997214

Sumber : Bank Indonesia

NPLs bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III 2007 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada tw.II 2007 NPLs bank umum sebesar 4,28%, maka pada triwulan laporan NPLs bank umum menjadi 3,47%. Secara nominal NPLs bank umum sedikit meningkat menjadi sebesar Rp.1,11 triliun. Meskipun secara nominal meningkat, namun karena penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan meningkat lebih besar dibandingkan dengan peningkatan nominal NPLs sehingga rasio NPLs perbankan di wilayah kerja KBI Batam mengalami penurunan.

**TABEL 3.8 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS  
KREDIT BANK UMUM**

*( miliar rupiah)*

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III
<b>Total</b>	<b>6.258.180</b>	<b>6.666.355</b>	<b>6.713.064</b>	<b>7.228.680</b>	<b>7.726.078</b>
- Lancar	4.978.457	5.658.971	5.658.159	6.179.304	6.616.103
- Dalam Perhatian Khusus	878.791	718.327	755.618	739.891	841.514
- Kurang Lancar	113.297	51.033	43.591	91.848	41.766
- Diragukan	30.406	28.018	38.974	46.772	34.427
- Macet	257.229	210.006	216.722	170.865	192.268
>> NPL (Nominal)	<b>400.932</b>	<b>289.057</b>	<b>299.287</b>	<b>309.485</b>	<b>1.109.975</b>
>> NPL (%)	<b>6,41</b>	<b>4,34</b>	<b>4,46</b>	<b>4,28</b>	<b>3,47</b>

Sumber : Bank Indonesia

### 3.2 KONDISI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

#### 3.2.1. TOTAL ASSET DAN DPK

Total asset BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.III 2007, total asset BPR mencapai Rp.586,75 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.39,78 miliar (8,67%) dibanding tw.II 2007 yang tercatat sebesar Rp. 458,78 miliar.

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR pada triwulan laporan meningkat dengan triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan II 2007 sebesar Rp.410,71 miliar, maka pada triwulan III 2007 meningkat menjadi Rp.459,30 miliar, atau naik sebesar Rp.48,59 miliar (11,83%) dan secara tahunan (yoy) meningkat Rp.145,27 miliar (46,26%). Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp.423,77 miliar atau 92,26% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 7,24% sisanya disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp.35,528 miliar. Hal ini merupakan kebalikan dari kondisi jenis simpanan masyarakat di Bank Umum dimana komposisi simpanan dalam bentuk tabungan lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk deposito. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito BPR yang tinggi menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lebih suka menyimpan dananya dalam bentuk deposito di BPR dibandingkan Bank Umum. Sedangkan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk tabungan di Bank Umum dipengaruhi karena kemudahan layanan seperti ATM dan untuk kepentingan pembayaran gaji (*pay roll*).

**TABEL 3.13 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET DAN DPK BPR**

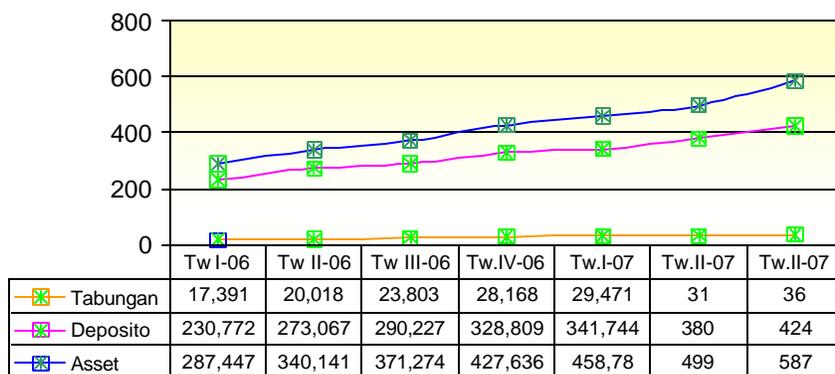
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006		2007		
	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III
<b>1. TOTAL ASSET</b>	<b>371.274</b>	<b>427.636</b>	<b>458.780</b>	<b>498.558</b>	<b>586.740</b>
<b>2. TOTAL DANA</b>	<b>314.030</b>	<b>356.977</b>	<b>371.215</b>	<b>410.714</b>	<b>459.302</b>
a. Tabungan	23.803	28.168	29.471	30.792	35.528
b. Deposito	290.227	328.809	341.744	379.922	423.774

Sumber: Bank Indonesia

Di samping itu, untuk kondisi di BPR, disparitas antara suku bunga deposito dan suku bunga tabungan relatif cukup besar yang menyebabkan jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk deposito lebih besar daripada tabungan. Bunga deposito berjangka BPR rata-rata sebesar 6,5%, sementara suku bunga tabungan rata-rata 4%. Tabungan pada BPR lebih bersifat sebagai rekening penampungan pencairan kredit dan pembayaran angsuran kredit.

**GRAFIK 3.7 – PERKEMBANGAN ASSET DAN DANA PIHAK KETIGA BPR**



### 3.2.2 KREDIT

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II 2007. Jumlah kredit yang diberikan oleh BPR yang beroperasi di wilayah kerja KBI Batam pada tw.III 2007 sebesar Rp.344,92 miliar atau meningkat Rp.38,35 miliar (12,51%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.306,57 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga dibarengi dengan peningkatan kualitas kredit, yang ditunjukkan dengan penurunan nilai NPL, dimana pada triwulan II 2007 NPL BPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,89% maka pada triwulan III 2007 menurun menjadi 0,78%.

**TABEL 3.14 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BPR**

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III
<b>Total Kredit</b>	<b>196.539</b>	<b>231.998</b>	<b>266.329</b>	<b>306.565</b>	<b>344.918</b>
Lancar	193.584	229.390	264.319	303.841	342.212
Kurang Lancar	1.977	1.600	1.024	1.551	1.903
Diragukan	624	765	771	877	316
Macet	354	243	215	296	486

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.III-2007 sebesar Rp.242,36 miliar atau 70,26% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.81,83 miliar atau 23,72% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi sebesar Rp.20,72 miliar (6,01%). Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Sebagian besar BPR di Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan kredit untuk keperluan pembelian mobil dan beberapa untuk pembelian rumah atau ruko. Kredit modal kerja dan kredit investasi lebih dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan multiplier efek yang lebih besar dibandingkan kredit sektor konsumsi.

**TABEL 3.15 – PERKEMBANGAN KREDIT BPR MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA**

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III
<b>Total Kredit</b>	<b>196.539</b>	<b>231.998</b>	<b>266.329</b>	<b>306.565</b>	<b>344.918</b>
a. Investasi	20.541	20.059	20.355	20.320	20.722
b. Modal Kerja	56.473	62.076	66.135	72.505	81.832
c. Konsumsi	119.524	149.863	179.839	213.740	242.364

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 3.15, penyaluran kredit investasi, kredit modal kerja dan konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 1,98%; 12,86% dan 13,39%. Peningkatan kredit khususnya konsumsi yang cukup tinggi ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Pertambahan jumlah penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan akan barang-barang konsumsi seperti mobil dan kepemilikan rumah meningkat.

Pada tw.III 2007, kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar kepentingan konsumsi masih didominasi kredit untuk sektor perdagangan yaitu sebesar Rp.46,22 miliar atau 60,48% dari total kredit untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Kemudian kredit untuk sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp.28,94 miliar atau 37,86% dari seluruh kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Sedangkan sektor pertanian dan perindustrian masing-masing sejumlah Rp.661 juta (0,86%) dan Rp.601 juta (0,78%). Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan menunjukkan industri ini masih merupakan sektor yang cukup berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan Tanjung Pinang.

**TABEL 3.16 – PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI YANG MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DARI BPR**

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2006		2007		
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
<b>SEKTOR EKONOMI</b>	<b>196.515</b>	<b>231.998</b>	<b>266.329</b>	<b>306.565</b>	<b>344.918</b>
a. Pertanian	410	298	852	720	661
b. Perindustrian	938	712	393	296	601
c. Perdagangan	32.739	36.796	40.347	41.167	46.223
d. Jasa-Jasa	21.885	27.156	24.577	27.461	28.937
e. Lainnya	140.544	167.036	200.160	236.921	268.496

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3.16, kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi secara rata-rata mengalami peningkatan. Sektor pertanian yang triwulan sebelumnya mengalami penurunan, pada triwulan III 2007 justru mengalami penurunan sebesar 8,19%. Peningkatan penyaluran kredit juga terjadi di sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan masing-masing sebesar 5,37% dan 12,28% dari triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit untuk sektor industri pada triwulan III 2007 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 103,04% menjadi Rp.601 juta dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Besarnya peningkatan ini dipengaruhi oleh penyaluran kredit untuk sektor industri yang sempat turun pada triwulan II 2007 yang tercatat Rp.296 juta. Peningkatan ini menunjukkan mulai bangkitnya sektor industri di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan laporan.

### 3.3 PERKEMBANGAN KREDIT UMKM

Upaya aktif Bank Indonesia untuk mendorong upaya pengembangan UMKM antara lain melalui pembentukan satgas KKMB. Selain itu, dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti Bantuan Teknis UMKM dan Rapat Koordinasi UMKM. Di samping itu, Bank Indonesia Batam juga turut serta dalam upaya untuk mendukung kegiatan Bazaar Intermediasi UMKM.

Selain itu, KBI Batam juga menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam dalam rangka peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM dan Koperasi yang disaksikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Suryadharma Ali.

Untuk wilayah kerja KBI Batam, dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III 2007 tercatat sebesar Rp. 4,46 triliun atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 4,09 triliun.

#### BOKS. 1

##### Pengembangan UKM Melalui Pameran Ekonomi Kerakyatan

Pameran ekonomi kerakyatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM) dan perbankan digelar sejak 14 Juli 2007 sampai dengan 22 Juli 2007 di atrium Mega Mall Batam Centre. Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali yang dilanjutkan dialog dengan Menteri, Wali Kota Batam dan Pemimpin Bank Indonesia Batam.

Kegiatan pameran UKM dan perbankan juga sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Batam dan nasional. Hasil pameran bukan sebatas pada nilai transaksi yang terjadi, melainkan juga efek promosi bagi UKM itu sendiri. Bagi pemerintah, program ini juga menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat.

Peserta yang mencapai 33 buah tersebut dapat menjalin komunikasi dengan para pengunjung terkait dengan informasi tentang UKM. Selain itu, mereka juga dapat langsung melakukan transaksi dengan pengunjung.

Selain mengenalkan produk dan jaringan pemasaran produk-produk UKM, pameran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan di Kota Batam. Fungsi bank dalam menerima dana tabungan masyarakat dengan penyaluran kredit seimbang sehingga dapat mempercepat laju pergerakan ekonomi di Batam. Selama ini, usaha kecil sering kesulitan dalam hal permodalan, sedangkan perbankan sendiri dengan asas kehati-hatiannya (*prudential banking*) kurang memberi kepercayaan penuh pada usaha kecil.

## **BAB IV**

# **PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH**

### **4.1. KONDISI UMUM**

Salah satu faktor pendukung utama bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah adalah jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah, demikian pula dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
  - Bagian dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **4.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 22,42% yang disebabkan peningkatan target penerimaan pada beberapa pos, antara lain: pos pendapatan asli daerah dan pos dana perimbangan. Sementara itu untuk pos bagi hasil pajak/bukan pajak terjadi penurunan target penerimaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1 – REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(dalam juta rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2006			2007	
		Tw.I	Sem. I	Sem. II	Jan	Sept
<b>I</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>91.770,24</b>	<b>92.218,77</b>	<b>234.960,64</b>	<b>214.017,80</b>	<b>215.352,76</b>
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>18.808,15</b>	<b>42.671,06</b>	<b>235.536,00</b>	<b>9.270,95</b>	<b>79.637,92</b>
1	Pajak Daerah	12.827,94	28.163,18	229.116,00	6.611,40	54.566,61
2	Retribusi Daerah	4.639,40	9.887,18	420,00	1.423,75	14.121,09
3	Lain-lain PAD yang sah	1.340,81	4.620,71	0,00	1.235,80	8.882,61
4	Laba Perusahaan yang Sah	-	-	6.000,00	-	-
<b>B</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>45.719,23</b>	<b>161.401,89</b>	<b>400.075,00</b>	<b>19.683,57</b>	<b>330.022,43</b>
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	6.100,06	25.486,99	222.075,00	1.408,57	118.675,59
2	Dana Alokasi Umum	2.028,55	61.023,52	178.000,00	18.275,00	182.750,00
3	Dana Alokasi Khusus	37.300,75	74.601,50	0,00	0,00	4.098,00
4	Bagi Hasil Pajak Provinsi	289,87	289,87	0,00	0,00	24.498,85
<b>C</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>156.297,62</b>	<b>296.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Untuk tahun 2007, KUA Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan,
3. Pembangunan infrastruktur perekonomian, pemerataan pertumbuhan antar daerah dan pengentasan kemiskinan,
4. Penguatan wilayah perbatasan,
5. Pengembangan keagamaan, kesenian dan pelestarian Budaya Melayu,
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan peningkatan pengawasan.

Adapun komponen pendanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdiri dari:

Pendapatan Daerah	Rp.1.115.393.669.534
Pembiayaan SILPA	Rp. 444.606.330.466
<b>Jumlah APBD</b>	<b>Rp.1.560.000.000.000</b>

### 4.3 APBD KOTA BATAM

Target APBD Kota Batam untuk sub pendapatan tahun 2007 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.746,04 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.135 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp.529,23 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.93,83 miliar.

Berdasarkan rincian APBD Kota Batam untuk tahun 2007, program kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan memiliki persentase terbesar terhadap total APBD

keseluruhan yang mencapai Rp.196,87 juta sedangkan persentase terkecil terdapat pada Biro Pemberdayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp.1,36 juta.

**TABEL 4.2 – ALOKASI DANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI BATAM TAHUN 2007**

NO.	KEBIJAKAN UMUM	TOTAL DANA (Juta Rupiah)
<b>I.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM &amp; PERTAMBANGAN</b> a. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan, jembatan/pelantar, pelabuhan. b. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan, pelantar dan jembatan. c. Meningkatkan utilitas perkotaan dan mewujudkan citra kota yang nyaman. d. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas infrastruktur di daerah hinterland.	<b>Rp. 196,870</b> Rp. 70,100 Rp. 68,526 Rp. 26,750 Rp. 31,494
<b>II.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b> a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi.	<b>Rp. 19,420</b> Rp. 19,420
<b>III.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b> a. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan & KB bagi masy.	<b>Rp. 27,126</b> Rp. 27,126
<b>IV.</b>	<b>DINAS PERINDAG DAN KOPERASI</b> a. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi. b. Pembinaan industri kecil dan menengah. c. Pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan.	<b>Rp. 10,607</b> Rp. 7,657 Rp. 2,500 Rp. 450
<b>V.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> a. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. c. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.	<b>Rp. 9,775</b> Rp. 4,225 Rp. 4,950 Rp. 600
<b>VI.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b> a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar. b. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.	<b>Rp. 55,176</b> Rp. 38,586 Rp. 16,590
<b>VII.</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b> a. Peningkatan kebudayaan dan kepariwisataan. b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.	<b>Rp. 8,250</b> Rp. 7,900 Rp. 350
<b>VIII.</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> a. Pengembangan pertanian dan perikanan.	<b>Rp. 5,500</b> Rp. 5,500
<b>IX.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b> a. Pengelolaan kebersihan kota.	<b>Rp. 9,739</b> Rp. 9,739
<b>X.</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASY DESA &amp; KESEJAHTERAAN SOSIAL</b> a. pemberdayaan UMKM dan koperasi. b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.	<b>Rp. 14,570</b> Rp. 9,950 Rp. 4,620
<b>XI.</b>	<b>BIRO PEMBERDAYAAN</b> a. pemberdayaan perempuan dan anak.	<b>Rp. 1,360</b> Rp. 1,360
<b>XII.</b>	<b>KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b> a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar.	<b>Rp. 5,500</b> Rp. 5,500
<b>XIII.</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN SETDA</b> a. Menyelenggarakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	<b>Rp. 2,970</b> Rp. 2,970

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

#### 4.4 APBD KOTA TANJUNG PINANG

Jumlah alokasi APBD Kota Tanjung Pinang pada tahun 2007 mencapai Rp.150,26 juta dimana alokasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Rp.51,79 juta. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 76.547 orang, terdapat 7,8% penduduk yang

merupakan pengangguran dengan nilai IPM mencapai 72,7 dan menduduki posisi 79 dari Kab/Kota.

**TABEL 4.3 – KEGIATAN PEMPROV KEPRI 2007 BERLOKASI DI KOTA TANJUNG PINANG**

NO	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)
1	DISDIKPORA	51.789.704.965
2	Dinas Kesehatan	13.404.510.680
3	Dinas Pekerjaan Umum	38.680.025.908
4	Dinas Perhubungan	37.888.534.350
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	217.612.500
6	BPMD dan Kesejahteraan Sosial	1.594.132.517
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.361.680.367
8	Dinas Pariwisata	3.327.725.000

#### 4.5 APBD KABUPATEN KARIMUN

Jumlah APBD Kabupaten Karimun tahun 2007 mencapai Rp.535 miliar atau meningkat 30,49% terhadap tahun 2006. Daerah Karimun memiliki potensi besar untuk dikembangkan diantaranya sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan, potensi pertanian, potensi perdagangan, serta potensi pertambangan.

**TABEL 4.4 – KEGIATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2007**

NO	DINAS/BADAN	JUMLAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dinas Pekerjaan Umum	7	40	Rp. 189.653.104.180,-
2	Dinas Pendidikan	1	24	Rp. 20.797.400.000,-
3	Dinas Perhubungan	1	4	Rp. 18.704.000.000,-
4	Dinas Kesehatan	3	9	Rp. 3.041.500.000,-
5	Dinas Perikanan	1	14	Rp. 12.400.000.000,-
6	Dinas Pertanian	1	10	Rp. 12.379.000.000,-
7	Dinas Pariwisata	2	5	Rp. 7.727.607.550,-
8	Dinas Tenaga Kerja	1	7	Rp. 4.216.738.000,-
9	Dinas Pertambangan	1	7	Rp. 8.141.332.640,-
10	Badan Pemberdayaan Masy Desa	1	4	Rp. 7.936.504.000,-
11	Dinas Perindustrian & Perdag.	1	15	Rp. 2.210.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>139</b>	<b>Rp. 287.207.186.380,-</b>

#### 4.6 APBD KABUPATEN BINTAN

Nilai APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2007 sebesar Rp.439 miliar atau menurun - 6,71% terhadap tahun 2006, sedangkan proyeksi APBD tahun 2008 adalah Rp.404 miliar dengan proyeksi realisasi PAD mencapai Rp.88,6 miliar pada tahun 2008.

Besarnya alokasi pembiayaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2007 mencapai Rp.48,15 miliar yang terdiri dari:

- a. Pembangunan Kantor Bupati Tahap I Rp.19.500.000.000,-
- b. Pembangunan Kantor DPRD Tahap I Rp.19.500.000.000,-
- c. Pembangunan Kantor Dinas PU (DAK) Rp. 5.959.000.000,-

d. Pendamping Pembangunan Kantor Dinas PU	Rp. 595.500.000,-
e. Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan	Rp. 2.593.176.660,-
<b>Total</b>	<b>Rp.48.147.676.660,-</b>

**TABEL 4.5 – PERKEMBANGAN APBD DAN REALISASI PAD KABUPATEN BINTAN**  
(miliar rupiah)

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2004	2005	2006	2007
1	Realisasi PAD	54	59	65,5	87,7
2	APBD	355	276	470,6	439

#### 4.7 APBD KABUPATEN LINGGA

Pembentukan Kabupaten Lingga adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor:31 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah Kabupaten Lingga yang mencapai 211.772 km<sup>2</sup> terdiri dari 377 buah pulau, dimana 92 buah pulau yang sudah berpenghuni dan sisanya merupakan pulau yang belum berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga adalah 84.254 jiwa dan memiliki PDRB sebesar Rp.257,69 miliar. Pendapatan perkapita penduduk di wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur mencapai Rp.7,4 juta/jiwa.

Untuk mengembangkan daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi telah menyusun beberapa program prioritas kegiatan Kabupaten Lingga yang terdapat pada APBD Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp.309,81 miliar dan terdiri dari:

a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Rp.105.000.000.000,-
b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	
- Pendidikan	Rp. 25.108.206.250,-
- Kesehatan	Rp. 7.485.000.000,-
c. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur	Rp.139.292.000.000,-
d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 18.965.358.200,-
e. Peningkatan dan pembangunan sosial dan budaya	Rp. 10.472.817.550,-
f. Memperkecil kesenjangan pembangunan kecamatan	Rp. 2.489.659.000,-

#### 4.8 APBD KABUPATEN NATUNA

Wilayah Kabupaten Natuna memiliki luas mencapai 264.788,51 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 93.644 jiwa. Daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 28,95 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki visi Menuju Natuna Makmur, Adil, Sejahtera Tahun 2020. Kabupaten

Natuna memiliki lima pilar utama dalam membangun daerahnya, yaitu: Iman dan taqwa, kesehatan, pendidikan, ekonomi, penegakan dan taat hukum.

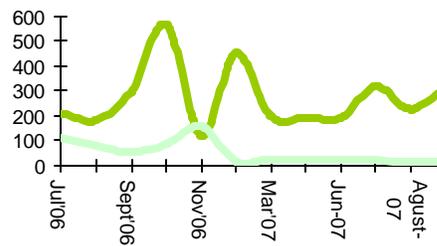
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran

5.1.1 Penedaran Uang Kartal

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.III 2007, *outflow* mencapai Rp.308,67 miliar, sementara *inflow* sebesar Rp.14,26 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp.294,41 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.283,51 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.15,89 miliar.

Grafik 3.8 Perkembangan Inflow/Outflow di KBI Batam (Rp. miliar)



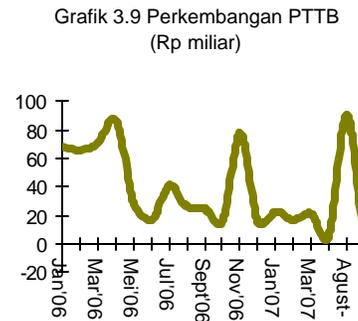
Sumber : Bank Indonesia

Pada triwulan laporan tercatat jumlah uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.308,11 miliar dan uang logam sebanyak Rp.551,9 juta. Sedangkan uang kertas yang masuk ke KBI Batam adalah sebesar Rp.14,26 miliar dan uang logam sebanyak Rp.376 ribu.

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) yaitu Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak kepada masyarakat. Kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Pada tw.III 2007, jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar sebesar Rp.2,85 miliar, menurun sebesar 46,12% terhadap triwulan sebelumnya. Namun untuk bulan Agustus kegiatan PTTB di KBI Batam sempat mengalami peningkatan dengan volume sebesar Rp.90,86. Namun pada bulan September kegiatan PTTB mengalami penurunan.



Sumber: Bank Indonesia

## 5.2 Lalu Lintas Pembayaran Giral

### 5.2.1 Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III 2007 mencapai Rp.4,58 miliar. Nilai total kliring tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya baik total warkat kliring maupun secara nominal, begitu pula secara rata-rata.

**TABEL 3.17 – PERKEMBANGAN KLIRING LOKAL**

(miliar rupiah)

Keterangan	2006			2007	
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
<b>Perputaran Kliring</b>					
- Lembar	134.863	103.808	104.613	108.413	216.342
- Nominal (juta Rp)	2.584.609	2.437.397	2.297.292	2.267.885	4.581.736
<b>Rata-rata Harian Perputaran Kliring</b>					
- Lembar	2.247	1.759	1.687	1.109	3.609
- Nominal (juta Rp)	43.077	41.312	37.053	22.355	76.362
<b>Penolakan Cek/BG Kosong</b>					
- Lembar	856	1.623	1.449	1.395	2.504
- Nominal (juta Rp)	14.506	33.611	33.885	120.547	55.179

Sumber : Bank Indonesia

Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.III 2007 rata-rata mencapai 3.609 lembar per-hari, meningkat 2500 lembar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1.687 lembar. Sementara untuk nominal transaksi kliring, pada triwulan III 2007 terdapat kenaikan sebesar Rp.359,46 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp.2,27 triliun.

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan kliring, maka Bank Indonesia menargetkan pengimplementasian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2007. Hal ini dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai yang cepat, aman, handal, dan efisien. Aplikasi SKNBI pertama kali diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, dimana sampai akhir tahun 2005 seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI.

### 5.2.2 Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada tw.II-2007 mengalami peningkatan baik pada transaksi masuk maupun transaksi keluar jika dibandingkan triwulan sebelumnya baik nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi RTGS untuk transaksi masuk sebesar Rp.5,2 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 8.113 transaksi, sementara untuk transaksi keluar sebesar Rp.4,37 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 7.518 transaksi.

**TABEL 3.18 – PERKEMBANGAN BI-RTGS**

Keterangan	2006		2007			Pert. q-t-q	
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Nom.	%
<b>Transaksi Masuk</b>							
Nominal (miliar Rp)	4.246	5.202	3.724	4.090	5.200	1.110	27,15%
Volume	6.135	6.427	6.865	6.668	8.113	1.445	21,67%
<b>Transaksi Keluar</b>							
Nominal (miliar Rp)	4.187	4.056	3.183	3.376	4.367	991	29,37%
Volume	6.866	5.995	5.753	6.090	7.518	1.428	23,45%

Sumber : Bank Indonesia

Penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia dimulai sejak tanggal 17 November 2000, dimana sistem BI-RTGS dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System* – HPVS) yang memiliki potensi terjadinya resiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Adapun implementasi sistem BI-RTGS di KBI Batam mulai dilaksanakan sejak 23 November 2001 bersamaan dengan KBI Pekanbaru.

### 5.3 Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada triwulan III 2007 berjumlah Rp.670.000,00 dan mencapai 14 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan nominal sebesar Rp.390.000,00 dengan jumlah lembar meningkat sebanyak 7 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 dilaporkan sebanyak 2 lembar, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 dilaporkan sebanyak 6 lembar, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.20.000,00 dilaporkan sebanyak 3 lembar dan uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.10.000,00 dilaporkan sebanyak 1 lembar.

Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum).

## BAB VI

# KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Jumlah pencari kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2007 mengalami peningkatan. Namun, kondisi pengangguran serta ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pengangguran belum menunjukkan perbaikan.

Naiknya harga-harga kebutuhan pokok selama periode triwulan laporan berdampak pada meningkatnya angka kebutuhan hidup minimum (KHM). Dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif stabil, menyebabkan beban masyarakat yang berpenghasilan setara ataupun dibawah UMP semakin berat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 6.1 KETENAGAKERJAAN DAERAH

Dari data ketenagakerjaan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2006<sup>6</sup>, jumlah pencari kerja meningkat 2,18% dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 574.935 orang menjadi 587.474 orang. Meningkatnya angka pertumbuhan pencari kerja tersebut sebagai akibat kelulusan sekolah, khususnya untuk tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang pada periode bulan Mei-Juni 2006 merupakan periode kelulusan siswa di Provinsi Kepulauan Riau.

**TABEL 1.2 – PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Keterangan	Feb 2006	Agust 2006	%
Angkatan Kerja	574.935	587.474	2,18
- Bekerja	513.457	515.560	0,41
- Pengangguran	61.478	71.914	16,98
Bukan Angkatan Kerja	333.467	327.549	-1,77
- Sekolah	76.213	61.375	-19,47
- Mengurus Rmh Tangga	216.216	220.851	2,14
- Lainnya	41.038	45.323	10,44
Total Penduduk 15+	908.402	915.023	0,73
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,69%	12,24%	1,55
TPAK	63,29%	64,20%	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

<sup>6</sup> Berdasarkan konfirmasi dengan Badan Pusat Statistik data terakhir untuk tenaga kerja Provinsi Kepulauan Riau adalah bulan Agustus 2006

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan berdasarkan data pada bulan Agustus 2006 adalah sektor industri sebanyak 127.511 orang atau sebesar 24,73%.

**TABEL 1.3 – JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Lapangan Pekerjaan	Feb 2006	% distribusi	Agust 2006	% distribusi	% perkembangan
Pertanian	101.484	19,76	100.866	19,56	-0,61
Industri	148.635	28,95	127.511	24,73	-14,21
Bangunan	36.507	7,11	31.990	6,20	-12,37
Perdagangan	88.446	17,23	117.821	22,85	33,21
Angkutan	47.734	9,30	45.241	8,77	-5,22
Keuangan	5.898	1,15	12.661	2,46	114,67
Jasa	77.748	15,14	73.965	14,35	-4,87
Lainnya	7.005	1,36	5.530	1,07	-21,06
<b>TOTAL</b>	<b>513.457</b>	<b>100</b>	<b>515.585</b>	<b>100</b>	<b>0,41</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terlihat bahwa terdapat peningkatan penduduk usia angkatan kerja, sebaliknya penduduk yang bukan angkatan kerja terjadi penurunan. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang meningkat 1,55% yaitu dari 10,69% (Feb 2006) menjadi 12,24% (Agust 2006).

Sementara itu, di samping sektor industri, jumlah angkatan kerja terbesar juga terdapat di sektor perdagangan sebanyak 117.821 orang (22,85%), dan sektor pertanian sebanyak 100.866 orang (19,56%). Meskipun demikian, perkembangan jumlah angkatan kerja berdasarkan sektor usaha sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan Februari 2006. Adapun pertumbuhan angkatan kerja terbesar terdapat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 33,21%.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor usaha yang memberikan tingkat distribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah serta mampu menyerap tenaga kerja di sektor tersebut. Kota Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta terdiri dari kepulauan turut mempengaruhi sektor usaha yang berkembang di wilayah ini. Di samping itu, rencana pengembangan wilayah serta kebijakan pemerintah yang mengarah pada perkembangan industri menyebabkan sisi perdagangan dan jasa menjadi sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian daerah.

## 6.2 KESEJAHTERAAN DAERAH

Salah satu alat ukur untuk mengetahui pencapaian kesejahteraan penduduk adalah kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli yang terangkum dalam Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kelangsungan hidup dan sehat adalah angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 mencapai 72,2 dan menempati urutan ke-7 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Batam menempati urutan IPM ke-8 dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 76,5 dan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2005.

**TABEL 1.4 – IPM KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2004**

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
<b>Provinsi Kepri</b>	<b>68,8</b>	<b>94,7</b>	<b>8,0</b>	<b>613,0</b>	<b>70,8</b>	<b>8</b>
Karimun	69,2	95,0	7,8	614,1	71,0	102
Bintan	69,0	92,3	7,1	613,9	69,7	152
Natuna	67,0	95,3	6,7	596,3	67,7	235
Lingga	68,9	90,3	7,0	605,0	67,7	236
Batam	70,1	98,4	10,4	634,2	75,8	11
Tj. Pinang	68,8	96,7	9,1	614,7	72,2	77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

Nilai IPM tahun 2006 lebih baik dibandingkan tahun 2005 menyebabkan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai IPM dengan peringkat yang baik disebabkan oleh angka harapan hidup yang masing-masing sebesar 70,5 tahun dan 69,5 tahun. Di samping itu peran angka harapan hidup tersebut juga ditunjang oleh komponen angka melek huruf dimana nilai untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,0% dan Kota Batam sebesar 98,8%.

Secara parsial per Kab/Kota angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Batam (70,5 tahun) sedangkan harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Natuna (67,5 tahun). Untuk Kab/Kota lainnya seperti Karimun, Bintan, Lingga dan Tanjung Pinang masing-masing sebesar 69,5 tahun, 69,3 tahun, 69,2 tahun, dan 69,1 tahun. Untuk indikator angka melek huruf, angka tertinggi terdapat di Kota Batam (98,8%) sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Lingga (90,9%).

**TABEL 1.5 - IPM KAB/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005  
UNTUK DAU 2006**

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
<b>Provinsi Kepri</b>	69,5	96,0	8,1	621,9	72,2	<b>7</b>
Karimun	69,5	95,0	7,8	620,8	71,7	101
Bintan	69,3	92,9	7,3	623,0	70,9	137
Natuna	67,5	95,3	6,7	602,0	68,4	239
Lingga	69,2	90,9	7,1	611,6	69,4	193
Batam	70,5	98,8	10,7	638,3	76,5	8
Tj. Pinang	69,1	97,3	9,2	616,5	72,7	79

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006*

## BAB VII

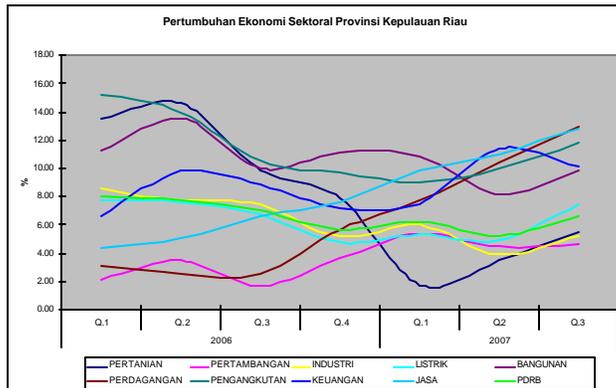
### PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH

Berdasarkan trend positif perkembangan indikator ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.III-2007, momentum disahkannya UU Free Trade Zone (FTZ) yang ditandai dengan masuknya investasi asing dalam jumlah besar, serta stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada tw.IV-2007 diperkirakan tumbuh positif dengan laju lebih tinggi dibandingkan tw.III-2007. Besarnya investasi yang mengalir ke Provinsi Kepulauan Riau, terutama kota Batam, Bintan dan Karimun (BBK), diperkirakan menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah serta ekspor turut mempengaruhi pertumbuhan positif perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Laju inflasi Batam pada triwulan IV-2007 diperkirakan akan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun ada kemungkinan mengalami tekanan terkait dengan hari raya keagamaan yang jatuh pada awal triwulan IV dan akhir triwulan IV tahun 2007.

#### 7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan laporan masih dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor, sementara investasi swasta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Masuknya investasi 22 PMA ke BBK senilai US\$1,9 miliar atau sekitar Rp17,5 triliun diperkirakan menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.IV-2007. Di samping itu, penurunan suku bunga dan perkiraan jumlah tenaga kerja yang akan diserap mencapai 50.566 orang yang berasal dari investasi baru tersebut akan memberikan stimulus positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Berkenaan dengan masuknya investasi tersebut dimana sebagian besar perusahaan yang masuk bergerak di sektor industri pengolahan terutama industri elektronik, turut mendorong peningkatan ekspor Provinsi Kepulauan Riau.

Pengeluaran konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan meningkat pada tw.IV-2007 disebabkan oleh pelaksanaan pembayaran proyek-proyek yang telah direalisasi pada triwulan-triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pola tahunan pengeluaran pemerintah daerah, dimana pada triwulan IV akan menghabiskan sekitar 80% dari jumlah anggaran belanja.



Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi 2007 masih didorong oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kenaikan konsumsi rumah tangga mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan serta sektor pengangkutan dan

komunikasi. Lonjakan harga minyak dunia diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan semakin penting, sejalan dengan mulai terealisasinya proyek-proyek investasi asing di akhir tahun 2007 dan tahun 2008. Maraknya proyek perumahan skala kecil dan menengah diperkirakan akan menumbuhkan kembali sektor bangunan setelah mengalami perlambatan memasuki tahun 2007.

Di samping itu, disahkannya Undang-undang FTZ pada awal Oktober 2007 menjadi momentum kebangkitan kembali perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, terutama kota Batam, Bintan dan Karimun yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.IV-2007 diperkirakan lebih ekspansif dibandingkan laju pertumbuhan triwulan-triwulan sebelumnya.

## 7.2 INFLASI

Memperhatikan kecenderungan pergerakan indikator ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta berdasarkan pemantauan pada hal-hal yang dapat memberikan pengaruh bagi pergerakan dimaksud seperti dampak musiman, pengaruh alam, agenda demokrasi dan perubahan kebijakan, serta perkembangan terkini mengenai perekonomian dunia pada triwulan III 2007, prospek inflasi pada periode triwulan IV 2007 diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat.

Faktor internal berupa Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Oktober 2007 diperkirakan akan memberikan tekanan kepada angka inflasi di Kota Batam. Naiknya harga kebutuhan pokok terutama dari kelompok bahan makanan khususnya untuk komoditas daging ayam dan telur ayam yang pada triwulan laporan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, diperkirakan akan kembali naik pada triwulan IV 2007.

Faktor musim yang pada triwulan IV 2007 akan memasuki musim penghujan akan berdampak pada distribusi bahan makanan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan daerah perairan sehingga akan berpengaruh pada kelancaran distribusi bahan makanan tersebut. Jalur distribusi bahan makanan yang sebagian besar menggunakan angkutan laut akan sedikit terganggu dengan adanya musim penghujan. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk harga-harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lain yang dipasok ke Kota Batam akan mengalami tekanan pada triwulan akhir tahun 2007.

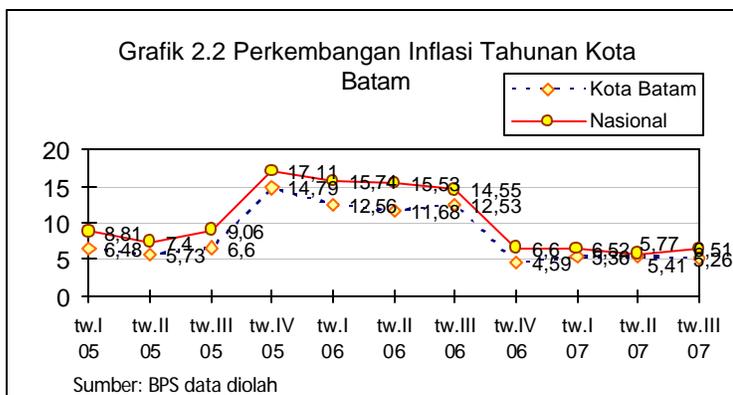
Di sisi lain, meskipun jalur distribusi akan sedikit terganggu pada triwulan akhir 2007 namun karena masih tercukupinya stok beberapa kebutuhan pokok diperkirakan cukup mampu meredam potensi gejolak harga yang terjadi sewaktu-waktu akibat kemungkinan *shock* di sisi penawaran. Stok beras di Bulog Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang diperkirakan cukup untuk meredam gejolak harga beras pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri pada Oktober 2007.

Faktor eksternal berupa krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang sempat menekan nilai tukar rupiah sehingga meningkatkan harga barang-barang impor untuk bahan baku diperkirakan akan mulai membaik seiring dengan mulai stabilnya perekonomian Amerika Serikat terkait dengan kebijakan penurunan suku bunga The Fed menjadi 4,75% pada tanggal 19 September 2007.

Naiknya harga minyak dunia yang pada triwulan laporan yang berada dalam kisaran 90 dolar per barel sempat menimbulkan kekhawatiran akan menyebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penggunaan bahan bakar gas untuk kepentingan rumah tangga dan digunakannya energi alternatif di luar minyak membuat pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM setidaknya pada

lima tahun mendatang.

Laju inflasi tahunan (y-o-y) Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2007 diperkirakan akan mengalami peningkatan meskipun tetap lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Trend



perkembangan inflasi kota Batam dari awal tahun 2005 sampai dengan triwulan III 2007 selalu

berada di bawah inflasi nasional. Perkembangan inflasi kota Batam yang selalu berada di bawah inflasi nasional salah satunya dipengaruhi oleh biaya hidup yang sudah cukup tinggi di Batam, sehingga kenaikan harga relatif tertekan. Secara tahunan inflasi Kota Batam turun menjadi sebesar 5,26% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,41%. Sampai dengan triwulan III 2007 inflasi kumulatif (y-t-d) Kota Batam tercatat sebesar 3,23% masih berada di bawah angka inflasi kumulatif nasional yang tercatat sebesar 4,41% (y-t-d).

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN**  
**WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM**

INDIKATOR	2006				2007			Pertumb qtq
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	
<b>MAKRO</b>								
<b>Laju Inflasi (q-t-q)</b>	<b>0.66</b>	<b>-0.39</b>	<b>2.28</b>	<b>1.97</b>	<b>1.42</b>	<b>-0.34</b>	<b>2.14</b>	<b>2.48</b>
IHK Bahan Makanan	1.76	-2.16	4.70	5.91	3.79	-2.4	5.02	7.42
IHK Makanan Jadi	0.93	0.25	2.88	0.98	1.32	0.27	0.32	0.05
IHK Perumahan	0.14	0.24	0.13	0.25	0.22	0.93	0.06	-0.87
IHK Sandang	0.22	0.35	-0.22	2.00	0.80	0.40	1.72	1.32
IHK Kesehatan	0.56	0.44	0.08	1.08	0.27	0.91	0.43	-0.48
IHK Pendidikan	-0.24	0.36	14.74	0.44	0.00	0.05	9.85	9.8
IHK Transport	0.10	0.11	0.27	0.01	0.47	0.02	0.16	0.14
Pertumbuhan PDRB (q-t-q)	1.42	1.98	1.86	0.42	1.99	0.9	4.51	3.61
Ekspor (Ribuan USD)	1,331,007	2,262,712	1,510,189	1,540,116	1,776,722	1,693.194		-99.90%
Impor (Ribuan USD) *)	2,755,827	2,182,516	1,755,450	2,390,744	1,992,707	2,109.679		-99.89%
<b>PERBANKAN</b>								
Deposito (miliar Rp)	2,302.86	2,725.13	2,934.75	3,506.05	3,560.43	3,196.35	3,131.87	-2.02%
Giro (miliar Rp)	3,429.73	4,435.88	4,988.06	5,086.04	5,057.69	5,602.99	6,061.73	8.19%
Tabungan (miliar Rp)	2,819.91	3,089.24	3,211.56	3,828.18	3,844.02	3,995.73	4,303.43	7.70%
<b>DPK (miliar Rp)</b>	<b>8,552.50</b>	<b>10,250.25</b>	<b>11,134.37</b>	<b>12,420.27</b>	<b>12,462.14</b>	<b>12,795.07</b>	<b>13,497.03</b>	<b>5.49%</b>
Total Asset (miliar Rp)	10,559.53	12,513.64	13,115.16	14,592.74	14,617.08	15,106.94	15,851.73	4.93%
Kredit Umum (miliar Rp)	5,771.56	6,283.82	6,258.18	6,666.36	6,713.06	7,228.68	7,726.06	6.88%
KUK (miliar Rp)	733.61	745.69	660.37	721.82	736.52	868.99	945.68	8.83%
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	15.58%	16.67%	17.34%	15.47%	24.85%			#DIV/0!
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertimbang)	10.20%	10.09%	9.82%	8.25%	8.15%			#DIV/0!
LDR (%)	67.48%	59.69%	56.21%	53.67%	53.87%	56.50%	57.24%	0.74%
NIM (%)	1.21%	2.31%	3.32%	4.09%	0.95%	2.00%	3.14%	1.14%
NPL (%)	6.17%	5.87%	6.41%	4.34%	4.46%	4.28%	3.47%	-0.81%
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>								
Inflow (miliar Rp)	804.04	416.46	235.33	232.92	120.71	60.55	47.68	-49.84%
Outflow (miliar Rp)	933.75	854.39	686.06	1,134.52	365.75	502.94	851.82	37.51%
PTTB (miliar Rp)	204.92	131.42	91.3	108.2	60.05	41.23	3.75	-31.34%
Nominal Uang Palsu	2,060,000	1,220,000	490,000	390,000	140,000	670,000	670,000	378.57%
Jumlah uang palsu (lembar)	25	28	11	8	4	18	14	350.00%
Volume Kliring (lembar)	146,241	154,662	134,863	103,808	104,613	108,413	216,542	3.63%
Nominal Kliring (miliar Rp)	2,168.74	2,734.43	2,584.61	2,437.40	2,297.29	2,267.88	4,581.72	-1.28%
<b>KEUANGAN DAERAH KOTA BATAM</b>								
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	18.81	42.67	67.90	94.68	17.01	0		-100.00%
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	2,028.55	58,994.97	124,236.99	150.97	36.55	0		-100.00%
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	37,300.75	37,300.75	722,713.15	10.33	-	0		

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: \*) Data impor sejak tahun 2005 termasuk Kawasan Berikat

TABEL 3. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Apr'07 s/d Jun'07 (Tahun 2002=100)

Kelompok	Juli 07		Agustus 07		September 07	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
<b>UMUM</b>	<b>134.42</b>	<b>0.36</b>	<b>135.82</b>	<b>1.04</b>	<b>136.82</b>	<b>0.74</b>
<b>I. BAHAN MAKANAN</b>	<b>137.85</b>	<b>-0.22</b>	<b>141.90</b>	<b>2.94</b>	<b>145.16</b>	<b>2.30</b>
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	169.19	-0.51	169.50	0.18	170.78	0.76
b. Daging dan hasil-hasilnya	116.81	1.62	119.89	2.64	125.32	4.53
c. Ikan segar	143.20	-0.76	143.93	0.51	145.47	1.07
d. Ikan diawetkan	133.91	0.16	134.13	0.16	134.27	0.10
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	117.21	0.88	120.66	2.94	124.00	2.77
f. Sayuran	146.42	-2.26	174.00	18.84	178.08	2.34
g. Kacang-kacangan	121.92	0.00	122.59	0.55	122.92	0.27
h. Buah-buahan	130.65	-0.55	131.26	0.47	132.66	1.07
i. Bumbu-bumbuan	125.25	-0.53	126.57	1.05	135.48	7.04
j. Lemak dan minyak	155.79	-0.26	159.70	2.51	164.17	2.80
k. Bahan makanan lainnya	132.98	0.00	132.98	0.00	132.98	0.00
<b>II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK &amp; TEMBAKAU</b>	<b>136.30</b>	<b>0.24</b>	<b>136.32</b>	<b>0.01</b>	<b>136.41</b>	<b>0.07</b>
a. Makanan jadi	135.53	0.00	135.55	0.01	135.55	0.00
b. Minuman yang tidak beralkohol	130.22	0.60	130.25	0.02	130.81	0.43
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	140.15	0.39	140.15	0.00	140.15	0.00
<b>III. PERUMAHAN</b>	<b>122.09</b>	<b>0.03</b>	<b>123.07</b>	<b>0.80</b>	<b>123.10</b>	<b>0.02</b>
a. Biaya tempat tinggal	112.73	0.02	114.29	1.38	114.31	0.02
b. Bahan bakar, penerangan dan air	151.22	0.02	151.23	0.01	151.25	0.01
c. Perlengkapan rumah tangga	113.10	0.18	113.10	0.00	113.16	0.05
d. Penyelenggara rumah tangga	113.59	0.06	113.74	0.13	113.80	0.05
<b>IV. SANDANG</b>	<b>116.00</b>	<b>0.34</b>	<b>116.59</b>	<b>0.51</b>	<b>117.61</b>	<b>0.87</b>
a. Sandang laki-laki dewasa	104.62	0.00	104.62	0.00	104.62	0.00
b. Sandang wanita dewasa	103.48	0.04	103.48	0.00	103.48	0.00
c. Sandang anak-anak	106.45	0.02	106.45	0.00	106.45	0.00
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	182.20	1.45	186.20	2.20	193.16	3.74
<b>V. KESEHATAN</b>	<b>110.89</b>	<b>0.11</b>	<b>110.90</b>	<b>0.01</b>	<b>111.24</b>	<b>0.31</b>
a. Jasa kesehatan	115.18	0.00	115.18	0.00	115.18	0.00
b. Obat-obatan	113.06	0.00	113.06	0.00	113.06	0.00
c. Jasa Perawatan Jasmani	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	108.80	0.19	108.81	0.01	109.40	0.54
<b>VI. PENDIDIKAN, REKREASI &amp; OLAH RAGA</b>	<b>153.47</b>	<b>9.85</b>	<b>153.47</b>	<b>0.00</b>	<b>153.47</b>	<b>0.00</b>
a. Jasa Pendidikan	210.95	17.88	210.95	0.00	210.95	0.00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	108.93	0.00	108.93	0.00	108.93	0.00
d. Rekreasi	112.61	0.00	112.61	0.00	112.61	0.00
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
<b>VII. TRANSPOR &amp; KOMUNIKASI</b>	<b>155.96</b>	<b>0.00</b>	<b>155.96</b>	<b>0.00</b>	<b>156.21</b>	<b>0.16</b>
a. Transpor	179.02	0.00	179.02	0.00	179.42	0.22
b. Komunikasi dan pengiriman	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	105.33	0.00	105.39	0.00	105.39	0.00
d. Jasa Keuangan	173.68	0.00	173.68	0.00	173.68	0.00

Sumber : BPS Batam

TABEL 4. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06	Q II/06	Q III/06	Q IV/06	Q I/07	Q II/07	Q III/07
<b>1. Batam</b>	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	14.79	0.66	-0.39	1.34	1.97	1.42	0.04	
<b>2. Pekanbaru</b>	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91	17.1	0.73	0.90	1.98	3.35	3.64	-0.01	
<b>3. Nasional</b>	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03	17.11	1.98	0.89	1.16	2.41	1.90	2.30	

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 5. DATA BANK UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dlm.Juta Rp.

KETERANGAN	Periode					
	Jun-06	Sep-06	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07
<b>TOTAL ASSET</b>	<b>12,173,496</b>	<b>13,115,164</b>	<b>14,592,742</b>	<b>14,617,078</b>	<b>15,106,938</b>	<b>15,851,731</b>
<b>DANA PIHAK III</b>	<b>10,250,252</b>	<b>11,134,372</b>	<b>12,420,268</b>	<b>12,462,137</b>	<b>12,795,065</b>	<b>13,497,036</b>
a. Giro	4,435,878	4,988,060	5,086,038	5,057,691	5,602,987	6,061,732
b. Deposito	3,089,243	2,934,752	3,506,054	3,560,426	3,196,346	3,131,872
c. Tabungan	2,725,131	3,211,560	3,828,176	3,844,020	3,995,732	4,303,432
<b>KREDIT</b>						
a. Jenis Penggunaan	<b>6,118,262</b>	<b>6,258,180</b>	<b>6,666,355</b>	<b>6,713,064</b>	<b>7,228,680</b>	<b>7,726,078</b>
- Modal Kerja	2,199,868	2,299,214	2,366,633	2,303,606	2,486,151	2,656,218
- Investasi	1,596,120	1,528,315	1,758,377	1,764,400	1,894,140	2,072,646
- Konsumsi	2,322,274	2,430,651	2,541,345	2,645,058	2,848,389	2,997,214
b. Golongan Kredit	<b>6,118,262</b>	<b>6,258,180</b>	<b>6,666,355</b>	<b>6,713,064</b>	<b>7,228,680</b>	<b>7,726,078</b>
- KUK	745,690	660,367	721,815	736,524	868,988	945,683
- Non KUK	5,372,572	5,597,813	5,944,540	5,976,540	6,359,692	6,780,395
b. Jenis Kredit	<b>6,118,262</b>	<b>6,258,180</b>	<b>6,666,355</b>	<b>6,713,064</b>	<b>7,228,680</b>	<b>7,726,078</b>
- UMKM	3,311,625	3,447,910	3,732,440	3,824,333	4,098,528	4,460,648
- Non UMKM	2,806,637	2,810,270	2,933,915	2,888,731	3,130,152	3,265,430
c. Kolektibilitas	<b>6,118,262</b>	<b>6,258,180</b>	<b>6,666,355</b>	<b>6,713,064</b>	<b>7,228,680</b>	<b>7,726,078</b>
- Lancar	4,957,027	4,978,457	5,658,971	5,658,159	6,179,304	6,616,103
- D.P.Khusus	801,847	878,791	718,327	755,618	739,891	841,514
- Kurang Lancar	43,229	113,297	51,033	43,591	91,848	41,766
- Diragukan	40,739	30,406	28,018	38,974	46,772	34,427
- Macet	275,420	257,229	210,006	2,216,722	170,865	192,268
<b>RATIO</b>						
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	59.69%	56.21%	53.67%	53.87%	56.50%	57.24%
b. Non Performing Loans (NPL)	5.87%	6.41%	4.34%	34.25%	4.28%	3.47%
c. Penyaluran KUK	12.19%	10.55%	10.83%	10.97%	12.02%	12.24%
b. Penyaluran UMKM	54.13%	55.09%	55.99%	56.97%	56.70%	57.73%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 6. DATA BANK UMUM  
WILAYAH KEPULAUAN RIAU \*)

Dlm. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode								
	Sep-05	Des-05	Mar-06	Jun-06	Sept-06	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07
<b>TOTAL ASSET</b>	<b>1,714,569</b>	<b>1,692,934</b>	<b>2,025,803</b>	<b>2,505,748</b>	<b>2,752,076</b>	<b>3,148,553</b>	<b>4,411,406</b>	<b>4,138,592</b>	<b>4,695,934</b>
<b>DANA PIHAK III</b>	<b>1,756,648</b>	<b>1,896,659</b>	<b>2,437,201</b>	<b>2,373,852</b>	<b>3,527,586</b>	<b>4,441,093</b>	<b>4,302,828</b>	<b>4,472,058</b>	<b>4,545,079</b>
a. Giro	637,206	690,472	935,856	925,238	1,799,219	1,750,407	1,593,936	1,903,262	2,053,499
b. Deposito	184,974	146,402	459,923	544,678	649,991	1,258,970	1,409,571	1,227,705	1,023,281
c. Tabungan	934,468	1,059,785	1,041,422	903,936	1,078,376	1,431,716	1,299,321	1,341,091	1,468,299
<b>KREDIT</b>									
<b>a. Jenis Penggunaan</b>	<b>296,024</b>	<b>116,251</b>	<b>739,121</b>	<b>741,651</b>	<b>991,558</b>	<b>1,077,505</b>	<b>1,090,551</b>	<b>1,202,837</b>	<b>1,351,451</b>
- Modal Kerja	240,065	186,747	325,025	306,969	342,744	398,016	371,052	429,443	456,183
- Investasi	45,364	(131,041)	149,391	155,244	181,457	188,952	195,943	204,834	275,459
- Konsumsi	10,595	60,545	264,705	279,438	467,357	490,537	523,556	568,560	619,809
<b>b. Golongan Kredit</b>	<b>296,024</b>	<b>116,251</b>	<b>739,121</b>	<b>741,651</b>	<b>991,558</b>	<b>1,077,505</b>	<b>1,090,551</b>	<b>1,202,837</b>	<b>1,351,451</b>
- KUK	172,276	190,331	165,491	156,478	219,646	235,960	226,598	294,463	340,303
- Non KUK	123,748	(74,080)	573,630	585,173	771,912	841,545	863,953	908,374	1,011,148
<b>b. Jenis Kredit</b>	<b>296,024</b>	<b>116,251</b>	<b>739,121</b>	<b>741,651</b>	<b>991,558</b>	<b>1,077,505</b>	<b>1,090,551</b>	<b>1,202,837</b>	<b>1,351,451</b>
- UMKM	235,385	289,039	514,989	508,797	2,183,879	774,145	801,835	880,751	950,062
- Non UMKM	60,639	(172,788)	224,132	232,854	(1,192,321)	303,360	288,716	322,086	401,389
<b>c. Kolektibilitas</b>	<b>296,024</b>	<b>116,251</b>	<b>739,121</b>	<b>741,651</b>	<b>991,558</b>	<b>1,077,505</b>	<b>3,090,551</b>	<b>1,202,837</b>	<b>1,351,451</b>
- Lancar	527,618	258,471	613,762	595,463	801,294	888,732	882,570	1,000,021	1,146,769
- D.P Khusus	(163,260)	(136,854)	37,822	53,146	72,340	147,365	144,434	134,748	137,635
- Kurang Lancar	(23,605)	(4,731)	413	2,941	86,919	14,740	21,240	12,032	18,382
- Diragukan	22,184	8,694	11,768	10,139	3,883	6,798	11,138	21,685	3,279
- Macet	(66,913)	(9,329)	75,356	79,962	27,122	19,870	2,031,169	34,351	45,386
<b>RATIO</b>									
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	16.85%	6.13%	30.33%	31.24%	28.11%	24.26%	25.34%	26.90%	29.73%
b. Non Performing Loan (NPLs)	-23.08%	-4.62%	11.84%	12.55%	11.89%	3.84%	66.77%	5.66%	4.96%
c. Penyaluran KUK	58.20%	163.72%	22.39%	21.10%	22.15%	21.90%	20.78%	24.48%	25.18%
d. Penyaluran UMKM	79.52%	248.63%	69.68%	68.60%	220.25%	71.85%	73.53%	73.22%	70.30%

Sumber : Bank Indonesia Batam

\*) meliputi Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Natuna

TABEL 7. DATA BANK UMUM  
KOTA BATAM

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode						
	Mar.2006	Jun 2006	Sep-06	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07
<b>TOTAL ASSET</b>	<b>8,160,702</b>	<b>9,131,399</b>	<b>9,421,420</b>	<b>9,966,611</b>	<b>10,181,336</b>	<b>10,478,486</b>	<b>11,155,797</b>
<b>DANA PIHAK III</b>	<b>6,178,643</b>	<b>7,197,490</b>	<b>7,606,786</b>	<b>7,979,175</b>	<b>8,159,309</b>	<b>8,323,007</b>	<b>8,951,957</b>
a. Giro	2,504,488	2,991,265	3,188,841	3,335,631	3,463,755	3,699,725	4,008,233
b. Deposito	1,758,180	2,099,628	2,284,761	2,247,084	2,150,855	1,968,641	2,108,591
c. Tabungan	1,915,975	2,106,597	2,133,184	2,396,460	2,544,699	2,654,641	2,835,133
<b>KREDIT</b>							
a. <b>Jenis Penggunaan</b>	<b>5,029,911</b>	<b>5,302,606</b>	<b>5,266,622</b>	<b>5,588,850</b>	<b>5,622,513</b>	<b>6,025,843</b>	<b>6,374,627</b>
- Modal Kerja	1,774,551	1,876,439	1,956,470	1,968,617	1,932,554	2,056,708	2,200,035
- Investasi	1,355,768	1,428,990	1,346,858	1,569,425	1,568,457	1,689,306	1,797,187
- Konsumsi	1,899,592	1,997,177	1,963,294	2,050,808	2,121,502	2,279,829	2,377,405
b. <b>Golongan Kredit</b>	<b>5,029,911</b>	<b>5,302,606</b>	<b>5,266,622</b>	<b>5,588,850</b>	<b>5,622,513</b>	<b>6,025,843</b>	<b>6,374,627</b>
- KUK	577,135	581,187	440,721	485,855	509,926	574,525	605,380
- Non KUK	4,452,776	4,721,419	4,825,901	5,102,995	5,112,587	5,451,318	5,769,247
b. <b>Jenis Kredit</b>	<b>5,029,911</b>	<b>5,302,606</b>	<b>5,266,622</b>	<b>5,588,850</b>	<b>5,622,513</b>	<b>6,025,843</b>	<b>6,374,627</b>
- UMKM	2,648,616	2,768,363	1,264,031	2,958,295	3,022,498	3,217,777	3,510,586
- Non UMKM	2,381,295	2,534,243	4,002,591	2,630,555	2,600,015	2,808,066	2,864,041
c. <b>Kolektibilitas</b>	<b>5,029,911</b>	<b>5,302,606</b>	<b>5,266,622</b>	<b>5,588,850</b>	<b>5,622,513</b>	<b>6,025,843</b>	<b>6,374,627</b>
- Lancar	4,054,901	4,281,312	4,177,163	4,770,239	4,775,589	5,179,283	5,469,334
- D.P. Khusus	736,427	775,283	806,451	570,962	611,184	605,143	703,879
- Kurang Lancar	19,663	29,270	26,378	36,293	22,351	79,816	23,384
- Diragukan	41,865	26,275	26,523	21,220	27,836	25,087	31,148
- Macet	177,055	190,466	230,107	190,136	185,553	136,514	146,882
<b>RATIO</b>							
a. <i>Loan to Dept Ratio (LDR)</i>	81.41%	73.67%	69.24%	70.04%	68.91%	72.40%	71.21%
b. <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	4.74%	4.64%	5.37%	4.43%	4.19%	4.01%	3.16%
c. <i>Penyaluran KUK</i>	11.47%	10.96%	8.37%	8.69%	9.07%	9.53%	9.50%
d. <i>Penyaluran UMKM</i>	52.66%	52.21%	24.00%	52.93%	53.76%	53.40%	55.07%

Sumber : Bank Indonesia Batam  
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 8. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR  
DAN KEGIATAN PEMBERIAN TANDA TIDAK BERHARGA (PTTB)  
KANTOR BANK INDONESIA BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
5	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
6	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
7	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75
8	Januari 2006	264,207.72	257,567.63	67,711.87
	Februari 2006	269,475.86	278,910.89	65,945.72
	Maret 2006	270,355.37	397,274.49	71,261.43
	<b>Trw. I 2006</b>	<b>804,038.95</b>	<b>933,753.01</b>	<b>204,919.02</b>
9	April 2006	259,239.21	289,319.31	86,798.58
	Mei 2006	96,796.99	255,199.80	28,321.03
	Juni 2006	60,424.38	309,874.21	16,302.79
	<b>Trw. II 2006</b>	<b>416,460.58</b>	<b>854,393.15</b>	<b>131,422.41</b>
10	Juli 2006	107,594.32	208,750.69	41,043.63
	Agustus 2006	75,633.01	180,680.87	25,709.93
	September 2006	52,102.99	296,627.42	24,550.11
	<b>Trw. III 2006</b>	<b>235,330.32</b>	<b>686,058.98</b>	<b>91,303.67</b>
11	Oktober 2006	85,386.48	566,756.20	15,326.60
	November 2006	153,597.90	117,756.21	77,549.63
	Desember 2006	13,933.54	450,008.64	15,326.60
	<b>Trw. IV 2006</b>	<b>252,917.92</b>	<b>1,134,521.05</b>	<b>108,202.83</b>
12	Januari 2007	80,529.98	68,103.18	22,192.11
	Februari 2007	16,412.91	103,517.88	16,804.76
	Maret 2007	23,766.94	194,126.92	21,058.78
	<b>Trw. I 2007</b>	<b>120,709.83</b>	<b>365,747.98</b>	<b>60,055.65</b>
13	April 2007	18,277.29	122,738.58	19,402.59
	Mei 2007	21,708.20	191,526.65	16,529.84
	Juni 2007	20,563.62	188,673.62	5,298.76
	<b>Trw. II 2007</b>	<b>60,549.11</b>	<b>502,938.85</b>	<b>41,231.19</b>
14	Juli 2007	14,848.17	226,312.06	-
	Agustus 2007	18,552.62	316,853.13	90.68
	September 2007	14,257.43	308,332.04	2,845.03
	<b>Trw. III 2007</b>	<b>47,658.22</b>	<b>851,497.23</b>	<b>2,935.71</b>

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 9. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.II/2006		Trw.III/2006		Trw.IV/2006		Trw.I/2007		Trw.II/2007		Trw.III/2007	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING												
1. WARKAT (Lbr)	154,662	2,535	134,863	2,141	103,808	1,759	104,613	1,687	108,413	1,749	216,542	3,383
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2,734,433	44,827	2,584,609	41,026	2,437,397	41,312	2,297,292	37,053	2,267,885	36,579	4,581,733	71,590
B. TOLAKAN KLIRING												
1. CEK KOSONG												
- Lembar	327	5	339	5	399	7	297	5	255	4	592	9
- Nominal (Jt.Rp)	6,654	109	7,384	117	13,912	236	7,683	124	6,314	102	15,689	245
2. BG. KOSONG												
- Lembar	685	11	517	8	486	8	393	6	366	6	748	12
- Nominal (Jt.Rp)	13,270	218	7,122	113	9,664	164	10,800	174	27,413	442	12,467	195
3. ALASAN LAIN												
- Lembar	491	8	568	9	738	13	759	12	774	12	1,164	18
- Nominal (Jt.Rp)	7,802	128	6,889	109	10,035	170	15,402	248	86,823	1,400	27,022	422
4. TOTAL TOLAKAN												
- Lembar	1,503	25	1,424	23	1,623	28	1,449	23	1,395	23	2,504	39
- Nominal (Jt.Rp)	27,725	455	21,826	346	33,611	570	33,885	547	120,549	1,944	55,179	862

Sumber : Bank Indonesia Batam